
LAPORAN PUBLIK

INFID



International NGO Forum on Indonesian Development

LAPORAN PUBLIK

INFID



International NGO Forum on Indonesian Development

infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Direktur Eksekutif INFID	V
Kata Pengantar Dewan Pengurus INFID	VI
Prakata Anggota, Jaringan, dan Mitra INFID	VIII
INFID dalam Angka	XII
INFID di tahun 2016	XIV
Ringkasan	1
1. Pendahuluan	3
1.1. Analisa Konteks	3
2.2. Tentang INFID	5
2. Implementasi dan Capaian Program di tahun 2016	7
2.1. Agenda Pembangunan Berkelanjutan	7
2.2. Penurunan Ketimpangan	8
2.3. HAM dan Demokrasi	9
3. INFID dalam Media	11
3.1. Media Masa	11
3.2. INFID dalam Media Sosial	13
4. Penguatan Kelembagaan	15
4.1. Respons pemerintah dan jaringan INFID terhadap program yang dijalankan INFID	15
4.2. INFID dan Jaringan Masyarakat Sipil	16
4.3. Kepercayaan Perguruan Tinggi dalam Proses Magang Mahasiswa	16
5. Laporan Keuangan	17
6. Lampiran-Lampiran	19
6.1. Policy Wish List 2016	18
6.2. Deklarasi Bojonegoro	22
6.3. Kegiatan INFID	24
6.4. Siaran Pers INFID	31
6.5. Daftar Publikasi INFID	32
6.6. INFID memberi Input Subtansi	33

KATA PENGANTAR



Laporan ini ditujukan kepada anggota INFID, pengurus INFID dan publik Indonesia. Laporan sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas INFID. Laporan memuat apa saja yang telah dilakukan, apa hasilnya dan sejauh mana kontribusi INFID. Selama 2016 INFID telah berupaya memberikan kontribusi untuk meraih Indonesia yang inklusif dan mandiri melalui untuk tiga program utama yaitu (i) pelaksanaan SDGs di Indonesia, (ii) penurunan Ketimpangan ekonomi dan (iii) pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi.

Ciri khas kegiatan-kegiatan tahun 2016 antara lain (i) Perluasan jaringan dan mitra kerja. INFID telah bekerjasama dengan berbagai pemerintah kabupaten dan kota (*Human Rights City*), dengan para Rektor Universitas dalam *mainstreaming* SDG; (ii) memulai kegiatan memajukan toleransi dan pencegahan radikalisme dan ekstrimisme; (iii) melanjutkan upaya penurunan ketimpangan di Indonesia melalui riset-riset untuk menemukan solusi-solusi yang paling berdampak terutama bagi kaum muda Indonesia; (iv) memperluas peran pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam pelaksanaan SDG Universitas, Pemerintah Daerah kabupaten dan kota, perusahaan, dan wartawan.

Beberapa hal yang kiranya menarik dari kegiatan tahun 2016 antara lain:

- Survei INFID di 6 kota tentang sikap kaum muda terhadap radikalisme dan ekstrimisme telah diliput luas oleh media utama. Survey menunjukkan 82 persen tidak setuju dengan kekerasan berbasis agama, namun ada 3 persen setuju termasuk setuju dengan tindak terorisme.
- Ikut serta dalam proses penyusunan Perpres SDGs, termasuk memberikan input substantif draft perpres SDG versi CSO kepada Bappenas dan KSP
- Berpartisipasi memberikan masukan kepada upaya Dewan HAM PBB menyusun dokumen *Human Rights City* (HRC)
- Menyelenggarakan Festival HAM 2016 di Bojonegoro sebagai ajang membagi pengetahuan, pengalaman, hasil pemantauan dan melihat praktik nyata pelaksanaan HRC di Kab Bojonegoro

Selama tahun 2016 INFID juga bekerjasama dengan pemerintah, di antaranya dengan KSP (Kantor Staf Presiden), Bappenas dan Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan SDG dan OGP (*Open Government Partnership*). Dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas akses pelatihan vokasi untuk menurunkan ketimpangan pasar kerja; dan dengan Komnas HAM untuk mendukung proses adopsi dan pelaksanaan HRC oleh kabupaten dan kota di Indonesia.

Selama tahun 2016 INFID telah melaksanakan rata-rata 8 kegiatan setiap bulan atau lebih dari 98 kegiatan selama satu tahun.

Terima kasih,

Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif



INFID dan Dinamika Advokasi Hak Atas Pembangunan

Akuntabilitas adalah kunci dalam agenda pembangunan dan Demokratisasi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Akuntabilitas adalah kondisi dan sekaligus upaya uji terhadap setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh aktor publik, bukan hanya negara dan pemerintahan, tetapi juga Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) seperti INFID. Sebagai Organisasi Masyarakat Sipil yang sudah berusia 31 tahun, bahkan dengan sejarah kemunculan yang sangat fenomenal melawan rezim Pembangunan otoritarian Soeharto, INFID menjadi salah satu lembaga OMS yang mampu memberikan laporan publik untuk mempertanggung jawabkan kegiatan, capaian, pendanaan dan interaksi advokasi pada isu Pembangunan di Indonesia.

Bjorne Hettne, dalam bukunya, *Teori Pembangunan dan Dunia Ketiga* (1990), menjelaskan sesuatu yang sangat relevan dengan kerja INFID, [Teori] pembangunan merupakan bagian dari pertemuan berbagai ilmu dan terapan. Hal ini yang membuat Pembangunan menjadi menarik sekaligus sulit, karena tidak hanya bergantung pada pendekatan ekonomi semata, tapi juga pada dimensi ilmu sosial yang lain dan teknologi. Namun, lebih jauh, Hettne, menjelaskan dibalik agenda Pembangunan kerap terjaid krisis, karena apa yang dipelajari berbeda dengan apa yang dijadikan kebijakan serta berbeda dengan apa yang diterapkan. Ibarat cinta segitiga yang tidak berkesesuaian. Contohnya ada di Poso, Sulawesi Tengah, terdapat penempatan tiang listrik yang berada ditengah jalan. Sesuatu yang tidak lazim. Gambaran ini menunjukkan ada jarak (*gap*) yang sangat serius antara ide, kebijakan dan implementasi Pembangunan. Dalam kaitan ini, INFID hadir dengan mengisi gap tersebut dalam bentuk koreksi dan advokasi asistensi ke negara sebagai institusi pembuat kebijakan pembangunan dan pelaksanaannya. INFID mengisi ruang kosong akibat jarak diantara ide, kebijakan dan pelaksanaannya. Namun ini bukan pekerjaan yang mudah, mengingat, masih menurut Hettne, Pembangunan adalah konsep yang terus berubah, saling berkejaran dengan situasi. INFID menjadi relevan untuk terus membangun indikator dari masyarakat untuk koreksi kebijakan pembangunan negara. Bagi INFID, pembangunan selayaknya dimiliki masyarakat dan harus berakhir pada masyarakat itu pula.

Untuk itu menjadi menarik menempatkan kerja INFID pada kerangka pendekatan hak asasi manusia. Pada Deklarasi Hak atas Pembangunan (1986), dipasal 1 ayat 1 disebutkan Hak atas Pembangunan adalah satu kesatuan hak asasi yang setiap orang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berhak untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan politik, dan semua hak dan kebebasan bisa terpenuhi. Dari deklarasi ini muncul sejumlah prinsip dalam pembangunan, *pertama*, berorientasi pada masyarakat, dimana setiap individu tanpa kecuali harus menjadi subyek pusat partisipasi dan penerima hasil pembangunan (ps. 2). *Kedua*, Partisipatif, dimana setiap orang dan semua masyarakat harus aktif secara bebas (tanpa tekanan atau hasutan) serta bermakna dalam turut serta merumuskan kebijakan pembangunan dan dalam menikmati hasilnya (ps. 2). *Ketiga*, *Equity*, Bahwa pembangunan penting dan harus untuk diberikan kepada yang paling membutuhkan atau dengan kata lain diberikan kepada yang paling tidak berdaya, alias pembangunan bukan dibuat untuk dinikmati bagi yang sudah berdaya

dan mapan (ps.2). *Keempat*, Non diskriminasi, kebijakan dan pelaksanaan pembangunan sangat dilarang dilakukan berbasis pada ras, jenis kelamin, bahasa atau agama tertentu saja (ps. 6). Kelima, menggunakan pendekatan berbasis HAM, dimana pembangunan harus menjamin terpenuhinya hak asasi dan kebebasan. *Terakhir*, Hak untuk menentukan nasib sendiri, dimana pembangunan harus memperhatikan dan oleh karenanya tidak bisa melanggar kedaulatan setiap orang dan masyarakat untuk menentukan sumber-sumber kemakmuran alamnya (ps. 1). Prinsip-prinsip ini semakin kuat diakui pada Deklarasi Wina 1993, dimana Pembangunan dan Demokrasi menjadi ruang yang patut diisi oleh prinsip-prinsip HAM.

Sepanjang 2016, INFID melalui 3 programnya, Ketimpangan Ekonomi dan Kemiskinan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) serta HAM dan Demokrasi, berupaya memenuhi berbagai aspek advokasi isu pembangunan yang berbasis HAM di dalam demokrasi Indonesia. Dari sisi partisipasi, sebagai contoh, keanggotaan INFID yang berasal dari Papua hingga Aceh menunjukkan upaya kerja advokasi partisipasi nasional. Hal ini ditambah dengan berbagai penguatan masyarakat melalui media massa dan media sosial. Namun demikian, sebagaimana akan dijelaskan secara lebih panjang di dalam badan laporan, agenda kerja INFID dengan cita-cita keberpihakannya pada masyarakat, tidak mudah tercipta mengingat sejumlah hal, Pertama, 2016 masih menjadi rentan waktu konsolidasi pemerintahan baru dibawah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, sebagai contoh sepanjang dua tahun pemerintahannya mengalami 3 kali pergantian kabinet. Hal ini mempersulit komunikasi dan kohesivitas pemerintah dalam menyambut partisipasi masyarakat. Kedua, terdapat sejumlah kebijakan yang justru anti terhadap konsep pembangunan itu sendiri, misalnya kebijakan pembangunan infrastruktur diatas tanah-tanah yang masih berkoeflik dengan masyarakat (adat). Pembangunan masih berbasis pada pendekatan yang berat pada ukuran ekonomi. Bahkan sampai pada tingkatan menjual standar hukum dimana memberikan amnesti pada pembayar pajak yang tidak pernah melaporkan kekayaannya demi mendapatkan dana. Ketiga, Pemerintahan baru di Indonesia muncul bersamaan dengan pencanangan komitmen global baru dalam soal SDGs. Namun sayang, girah pemerintah tak sebesar semangat INFID dalam mengawal pelaksanaan SDGs di Indonesia. Gambaran kecil diatas adalah tantangan-tantangan yang dihadapi INFID, oleh karena wajar jika kemudian pada sejumlah bentuk advokasi, INFID harus bahagia dengan penerimaan gagasan, dan belum bisa melihat karya nyata dari negara, belum ada *meaningful* pembangunan, seperti pada program Kota Ramah HAM, yang hanya dicanangkan oleh pemerintah melalui Kantor Kemeterian Hukum dan HAM.

Kedepan, INFID harus dan akan terus memperkuat kerja advokasi kebijakan Pembangunan yang bersandarkan pada kepentingan masyarakat sesuai nilai-nilai hak-hak asasi yang konstitusional. Dengan sandaran ini, Infid bisa terus, sebagaimana kiprahnya selama 31 tahun, berkontribusi dalam arus tantangan ide dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Hettne diatas.

Tak lupa, Dewan Pengurus dan Anggota INFID, dari Papua hingga Aceh, Mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Badan Pekerja dan Sekretariat INFID atas kerja dan upaya advokasi serta akuntabilitasnya. Bagi Masyarakat luas, kami menantikan partisipasi dalam kerja-kerja INFID, terutama paska membaca laporan ini.

Salam,

Haris Azhar
Wakil Ketua Board INFID

PRAKATA ANGGOTA, JARINGAN, DAN MITRA INFID



Apresiasi setinggi-tingginya kepada INFID yang telah melaksanakan 98 kegiatan selama tahun 2016. Meliputi 43 kegiatan program *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan 17 kegiatan Program Penurunan Ketimpangan, serta 38 kegiatan Program Hak Azasi Manusia dan Demokrasi. Diantara 17 kegiatan Program Penurunan Ketimpangan, terdapat 6 kegiatan yang berkaitan erat dengan perluasan kesempatan kerja, yang memang berkontribusi langsung terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Saya berharap, Program Penurunan Ketimpangan melalui perluasan kesempatan kerja ini akan tetap menjadi prioritas INFID dan semua pihak terkait sehingga selaras dengan Nawacita dan Nawa Kerja Pembangunan Ketenagakerjaan 2015-2019.

Muhammad Hanif Dhakiri

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia



"Kehadiran INFID makin terasa di tahun 2016. Program-program yang dihela INFID menunjukkan fokus isu kerja dan delivery yang kuat. Jaringan Gusdurian Indonesia mengapresiasi model & hubungan kerja yang setara dan seimbang saat bekerja bersama INFID.

Ke depannya, tantangan bagi INFID adalah memperkuat perannya sebagai penggerak sinergi organisasi masyarakat sipil, karena di Indonesia ruang ini belum banyak terisi. Padahal tantangan berbangsa bernegara membutuhkan sinergi dari berbagai OMS lintas sektor isu".

Alissa Wahid

Jaringan Gusdurian Indonesia



Ada banyak cara untuk memajukan praktek HAM di dunia, khususnya di Indonesia. Tapi saya terkesan cara kawan-kawan INFID, mengadvokasi tanpa merendahkan, kritis tapi tidak sinis, mengedepankan kolaborasi daripada distorsi, memberi ruang semua pihak terlibat aktif. Cara positif ini menurut saya jauh lebih efektif daripada pendekatan negatif yang cenderung menegasikan usaha yang sedang tumbuh. Bersama INFID dan Komnas HAM, kami buat festival HAM 2016 yang dampaknya bagus bagi pertumbuhan kualitas kehidupan lokal.

Kang Yoto

Bupati Bojonegoro



Suatu organisasi dapat dikatakan berkembang jika ia tidak mendefinisikan kebaikan dirinya sendiri. Suatu organisasi sepanjang keberadaannya harus dapat menunjukkan pengakuan dari berbagai organisasi yang relevan. INFID adalah organisasi yang hadir untuk mengawasi moda pembangunan di Indonesia. Organisasi ini pernah sangat kritis terhadap agen pembangunan utama yaitu pemerintah. Kini INFID adalah mitra kritis yang dipercaya oleh pemerintah. Ia juga memperluas pengakuan ke organisasi yang lebih beragam. Hal ini tidak akan dapat dicapai tanpa fokus dan kedisiplinan. Organisasi lain hanya mendekat jika suatu organisasi, dalam hal ini INFID, dapat memenuhi kebutuhan untuk menjalankan fungsinya. Seperti inilah yang terjadi pada beberapa mitra INFID yaitu pemerintah daerah, perguruan tinggi dan media massa.

Pada saat yang sama, teknologi informasi membuat Indonesia dan dunia pada umumnya lebih terbuka. Arena publik mempunyai jauh lebih banyak gagasan dan kerja yang lebih kompetitif. Hal ini merubah tuntutan atas kesempurnaan kerja. Organisasi seperti INFID harus menentukan jalan perimbangan antara perluasan pengetahuan serta keragaman keterlibatan dengan kesempurnaan gagasan ide. Di tengah tantangan yang sesungguhnya dihadapi semua organisasi ini, INFID bagaimanapun telah memiliki modal jaringan kepercayaan. Saya berharap INFID dapat menemukan rumusan terbaik dalam pengelolaan pengetahuannya!

Meuthia Ganie-Rochman

Sosiolog bidang Organisasi, mengajar di Universitas Indonesia



2016 berlalu dengan berbagai catatan menarik di Dunia maupun di Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang masif di Indonesia, menarik perhatian saya secara pribadi, karena saya berusaha mencari justifikasinya bagi penciptaan keadilan di Indonesia. Ketika saya terlibat sebagai duta masyarakat sipil SDGs bersama INFID, maka saya mendapatkan bingkai pemikiran dalam menjawab pertanyaan: Apakah terjadi penciptaan keadilan lewat pembangunan infrastruktur yang masif di Indonesia?

Bingkai pemikiran kritis atas issue pembangunan diperlukan karena, dari situlah pijakan awal advokasi yg masuk akal dan kontekstual dalam kehidupan di Indonesia. Sementara itu pemikiran kritis akan memastikan kehidupan berbangsa yang progresif, serta selalu berada dalam kontekstual *mainstream* Dunia. Pada akhirnya kita semua bisa memastikan keterlibatan semua dan keberpihakan pada semua.

Muhammad Farhan

Pekerja Seni dan Duta SDGs Masyarakat Sipil



Dalam beberapa tahun terakhir, INFID membidik isu-isu penting dan mendasar yang dihadapi Indonesia: ketimpangan ekonomi dan sosial, hak asasi manusia, dan pembangunan yang berkelanjutan. Tidak hanya mengidentifikasi dan memetakan problem-problem pokok yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat, lembaga ini juga mengajukan berbagai skema kebijakan publik untuk mengatasi problem-problem tersebut. Tidak sekadar mengeluarkan pernyataan-pernyataan politik, lembaga ini juga melakukan studi ekstensif dan mengambil posisi kebijakan yang ditopang dengan kekuatan data dan argumen yang sistematis.

Di tengah maraknya perdebatan politik dan kebijakan yang kini cenderung dibikin ringkas, massal, miskin data – dan komersial, INFID menjadi oase menyejukkan bagi mereka yang menginginkan kedalaman dalam diskusi-diskusi isu-isu sosial kemasyarakatan dan dalam perdebatan tentang opsi-opsi kebijakan publik yang berbasis data. Usia 31 tahun bukanlah usia yang pendek bagi sebuah lembaga yang mampu bertahan dalam dua jaman, dan secara kontinyu memberikan laporan-laporan studi kemasyarakatan serta dan advokasi kebijakan. Kita memerlukan lembaga ini di Indonesia sebagai salah satu cara untuk menjaga terpeliharanya akal sehat dan kedalaman dalam diskusi dan perdebatan publik.

Kuskridho Ambardi
Universitas Gadjah Mada



INFID merupakan partner strategis bagi Oxfam baik untuk kerja-kerja kami di tingkat internasional, regional ASEAN dan tentunya di Indonesia. Laporan ini menunjukkan sumbangsih nyata INFID melalui program-programnya untuk memastikan bahwa masyarakat sipil berpartisipasi dalam perjuangan dan diskursus mengenai penurunan ketimpangan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Harapan kami agar INFID dan jaringannya ke depannya makin meneguhkan posisinya untuk menyuarakan kepentingan masyarakat sipil Indonesia melalui program-programnya dan menjadi kawan kritis bagi Pemerintah baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Dini Widiastuti
Oxfam di Indonesia



Bagi kami yang berada di Aceh yang bekerja untuk kemanusiaan, menilai kehadiran INFID sangat penting yaitu sebagai penyambung kampanye di tingkat internasional tentang proses KKR yang sedang berlangsung di Aceh. INFID bersama anggotanya sangat baik dalam mendukung pemerintah guna menuntaskan target negara untuk pencapaian SDGs.

Zulfikar Muhammad
Koalisi NGO HAM Aceh



Sudah lebih dari 18 tahun kami menjadi anggota INFID. Saya merasa ini benar-benar jaringan yang sangat berbeda dibandingkan dengan jaringan-jaringan lainnya yang kami terlibat. INFID sangat responsif dan konsisten terhadap isu advokasi pembangunan dari waktu ke waktu. INFID sangat menghargai masukan anggotanya, khususnya dalam advokasi pembangunan MDGs maupun SDGs. INFID konsisten dalam mendorong Pemda-Pemda khususnya di NTT untuk dapat mengarusutamakan MDGs di tingkat propinsi dan kabupaten/kota.

Demikian juga dengan SDGs, INFID sebagai perwakilan masyarakat sipil hadir memberikan warna dalam menyiapkan implementasi SDGs bukan hanya di nasional tapi juga mendorong jaringan di daerah untuk terlibat secara aktif dalam implementasi SDGs. Hal yang menarik adalah INFID adalah mendorong dan terlibat secara aktif untuk membangun kota HAM di Indonesia. Walaupun belum banyak Pemda/Pemprop di Indonesia yang mau melakukan hal ini tetapi perlu diapresiasi kerja-kerja INFID karena ada beberapa kota/kabupaten yang secara sadar dan inovatif menjadikan daerahnya benar-benar kab/kota Ramah HAM.

Sarah Lery Mboik
PIAR NTT

INFID DALAM ANGKA

2004

Tahun ketika INFID memperoleh akreditasi *special status* di bawah ECOSOC PBB

70
ANGGOTA



ANGGOTA
FACEBOOK
INFID

f 7.094

FOLLOWER
DI TWITTER

t 1.898

3

PROGRAM
UTAMA

Ketimpangan, HAM
dan Demokrasi, SDGs

12

MITRA KERJA JARINGAN
CSO GLOBAL

(IFP, Together2030, Action for Sustainable Development ((A4SD), Open SDGClub, Open Government Partnership, Civil20-G20, ADA, ADN, BRICSAM, CIVICUS, APF, Asia LDC-Net)



Lebih dari **98 KEGIATAN** selama satu tahun atau rata-rata 8 kegiatan diselenggarakan baik di daerah, nasional maupun internasional



16

STAFF

bekerja di sekretariat INFID



31

TAHUN

Usia INFID pada tahun 2016

2 KALI

KONFERENSI

Pertemuan Nasional SDGs dan Festival HAM di Kabupaten Bojonegoro

2 TUGAS

sebagai anggota *steering committee* jaringan CSO global. (Beyond2015, Open Government Partnership)



19

RILIS MEDIA DAN 19 PUBLIKASI INFID

219

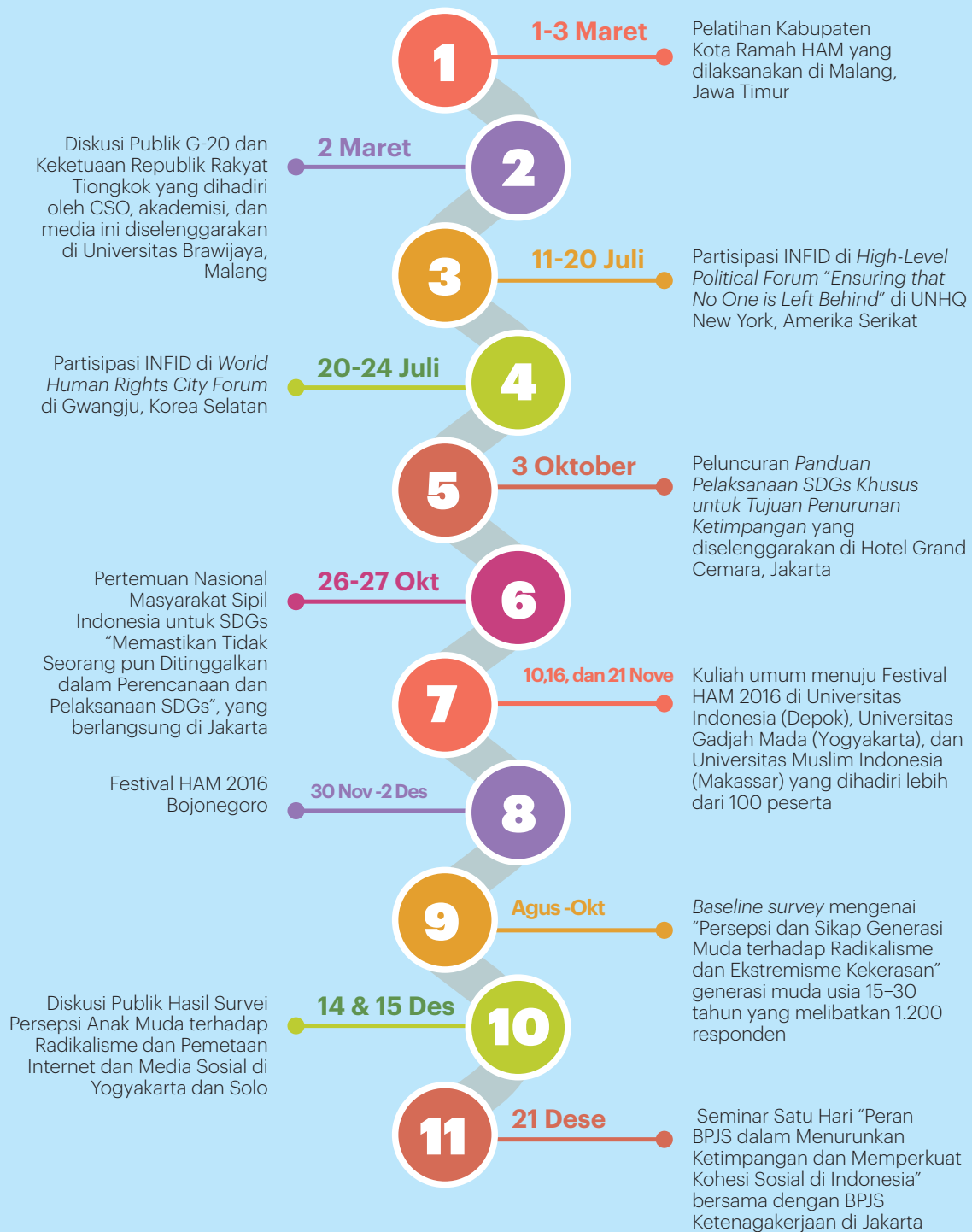
PEMBERITAAN MEDIA



Rp 11.950.885.720

DANA YANG DIKELOLA

INFID DI TAHUN 2016



RINGKASAN

Tahun 2016, tahun dimulainya pelaksanaan SDGs, yang juga ditandai lahirnya beragam kebijakan, munculnya tokoh-tokoh inspiratif dari sejumlah daerah, menurunnya tingkat ketimpangan, dan di sisi lain ditandai juga maraknya aksi intoleransi dan kekerasan. Situasi tersebut mewarnai advokasi INFID. Sepanjang 2016, seperti juga tahun sebelumnya, advokasi INFID mengawal tiga isu besar, yakni Ketimpangan, HAM dan Demokrasi, SDGs. Adapun program-program di tiga isu tersebut dilaksanakan dengan lebih dari 98 kegiatan, baik di daerah, tingkat nasional, maupun internasional, dalam bentuk konferensi, seminar, lokakarya, festival, pelatihan, pertemuan, penerbitan buku panduan, survei, dan sebagainya. Jumlah kegiatan yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Sebagai organisasi masyarakat sipil yang pada tahun 2016 berusia 31 tahun, bersama 12 mitra kerja jaringan CSOs global serta 70 anggota jaringan, INFID mengemban visi mewujudkan demokrasi, kesejahteraan, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional.

Adapun implementasi dan capaian program pada tahun 2016, di isu SDGs, INFID berperan dalam penyebaran informasi mengenai SDGs dengan mengeluarkan dua panduan pelaksanaan SDGs dan Duta Masyarakat Sipil untuk SDGs. Sementara itu, di isu penurunan ketimpangan, INFID mengusulkan kebijakan perluasan kerja melalui perluasan akses dan mutu pelatihan kerja melalui kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan; memberikan respons terhadap *Panama Papers*. Di isu HAM dan demokrasi, INFID menghasilkan informasi sekaligus mendistribusikannya sehingga menjadi pengetahuan bagi masyarakat; dan menjalin kerja sama, mengkritisi, dan menawarkan peluang-peluang dalam sebuah isu atau program yang menjadi advokasi INFID.

Kerja-kerja INFID pada tahun 2016, dengan mengelola dana sekitar Rp 11 miliar, meningkat hampir dua kali lipat dari tahun 2015--dan dengan 16 staf yang bekerja di sekretariat, mendapat respons yang baik dari berbagai kalangan di tingkat daerah, nasional, dan internasional. Sambutan positif itu datang dari badan dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi masyarakat sipil tingkat internasional, pemerintah di sejumlah negara, kalangan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, universitas, serta masyarakat luas. Respons konkret tersebut antara lain berupa kerja sama dengan Kabupaten Bojonegoro, Wonosobo, Kulonprogo, Lampung Timur, dalam berbagai bentuk seperti Festival HAM, mendorong penurunan ketimpangan, pengembangan Sistem Penanganan Konflik Kepentingan di Universitas Airlangga, dan pelaksanaan SDGs serta program pemagangan mahasiswa.

Sambutan media massa cetak dan elektronik juga cukup baik, dengan jumlah liputan/pemberitaan 219, meningkat dari tahun 2015 yang mencapai 118 pemberitaan. Pengakses situs web INFID dan anggota media sosial INFID, seperti Facebook dan Twitter, juga meningkat dari tahun sebelumnya.



1 PENDAHULUAN

1. 1. Analisis Konteks

Tahun 2016 ditandai dengan berbagai peristiwa penting, yang memberi warna dalam advokasi INFID. Peristiwa tersebut meliputi 1) dua tahun pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla yang disertai dengan lahirnya beragam kebijakan, baik yang mendapat dukungan maupun kritikan dari masyarakat sipil; 2) munculnya tokoh-tokoh inspiratif dari daerah yang membawa angin perubahan bagi pembangunan di Indonesia; 3) satu tahun pelaksanaan SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang telah ditetapkan sebagai Tujuan Pembangunan Global pada tahun 2015; dan 4) tidak menentunya kondisi ekonomi dan politik internasional yang mendorong kerja sama baru antarnegara.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Di bidang politik, tahun 2016 menjadi ujian bagi proses demokrasi di Indonesia dengan maraknya politik identitas berbasis agama dan suku. Isu-isu intoleransi, kekerasan berbasis agama hingga suku, radikalisme masih sering terjadi dan kerap digunakan para elite politik di dalam memenangkan salah satu kandidat di tengah kontestasi politik.

Di bidang ekonomi dan sosial, meskipun penurunan ketimpangan belum signifikan, komitmen pemerintah untuk terus menurunkan ketimpangan patut diapresiasi. Pemerintah menetapkan turunnya rasio gini sebagai salah satu indikator kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berdasarkan laporan Biro Pusat Statistik (BPS), rasio gini turun dari 0,41 menjadi 0,40. Meskipun pada saat yang sama, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak yang mendapatkan kritikan keras dari masyarakat sipil. Menurut masyarakat sipil, termasuk INFID, kebijakan pengampunan pajak mencederai rasa keadilan orang-orang yang taat membayar pajak dengan orang-orang yang tidak membayar pajak. Mereka yang selama ini menyembunyikan kekayaan mendapatkan karpet merah dari negara dengan tarif pajak yang rendah, hingga janji untuk melindungi data wajib pajak dari proses penyelidikan hukum.



Munculnya tokoh-tokoh daerah yang memiliki komitmen terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti Drs. Suyoto M.Si, Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, periode 2008–2018, yang berhasil menjadikan Kabupaten Bojonegoro sebagai Kabupaten Ramah HAM dengan berbagai kebijakannya, termasuk kebijakannya dalam menerapkan prinsip keterbukaan di dalam pemerintahan (*open government*). Demikian halnya dengan Hasto Wardoyo, Bupati Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, periode 2011–2016 yang berhasil mengangkat perekonomian Kabupaten Kulonprogo dengan program “Bela dan Beli Kulonprogo”, termasuk anjurannya bagi pegawai negeri sipil di Kulonprogo untuk membeli beras dari petani di Kulonprogo. Juga praktek-praktek baik lainnya dari tokoh-tokoh di daerah yang memberikan inspirasi bagi kemajuan pembangunan di Indonesia.

Tahun 2016 juga merupakan satu tahun pelaksanaan SDGs, agenda pembangunan global yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sidang Umum PBB pada September 2015. Sebagai agenda internasional, yang proses penyusunannya melibatkan hampir seluruh aktor pembangunan di dunia seperti pemerintah, masyarakat sipil dan swasta, maka muncul desakan agar mekanisme yang sama dalam pelaksanaan SDGs di tingkat nasional juga partisipatif dan melibatkan seluruh aktor pembangunan. Belajar dari pengalaman pelaksanaan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang hanya menjadi agenda pemerintah semata, maka SDGs haruslah dilaksanakan secara partisipatif dan juga disertai dengan kelembagaan yang akuntabel dan transparan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Tanpa adanya mekanisme yang demokratis di dalam pelaksanaan SDGs,

sulit untuk mencapai 17 Tujuan dan 169 Target yang telah disepakati bersama. Karena itu, tahun 2016 menjadi penting karena mengawali pelaksanaan SDGs di tingkat nasional.

Di tingkat internasional, keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat menjadi pukulan telak bagi globalisasi, sekaligus menambah suramnya situasi ekonomi internasional yang sesungguhnya belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi pada tahun 2008. Kampanye Donald Trump yang akan mengevaluasi kerja sama perdagangan antar-kawasan, hingga keputusannya untuk membatalkan perjanjian perdagangan *Trans Pacific Partnership* (TPP) menunjukkan kecenderungan kebijakan ekonomi politik internasional-nya yang bersifat sepihak (unilateral) dan mengabaikan norma-norma multipihak (multilateral). Demikian halnya dengan keputusan rakyat Inggris yang memilih keluar dari Uni Eropa merupakan tamparan keras bagi globalisasi melalui penyatuan pasar di satu kawasan. Situasi-situasi ini diperkirakan dapat memperburuk berbagai kerja sama ekonomi dan politik internasional, termasuk kemitraan global untuk pencapaian SDGs.

Bidang hak asasi manusia, INFID juga melakukan advokasi internasional sebagai upaya mempercepat terbitnya *Guiding Principles on Local Government and Human Rights* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Panduan tersebut sangat relevan untuk mendorong upaya-upaya penyelesaian pelanggaran hak asasi pada masa lalu sekaligus mendorong peran aktif pemerintah daerah di Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warganya.

Keseluruhan situasi tersebut memberi warna di dalam advokasi INFID pada tahun 2016. Bentuk pengaruhnya dan juga respons INFID terhadap situasi-situasi tersebut, akan diurai di dalam bab-bab berikutnya di laporan ini.

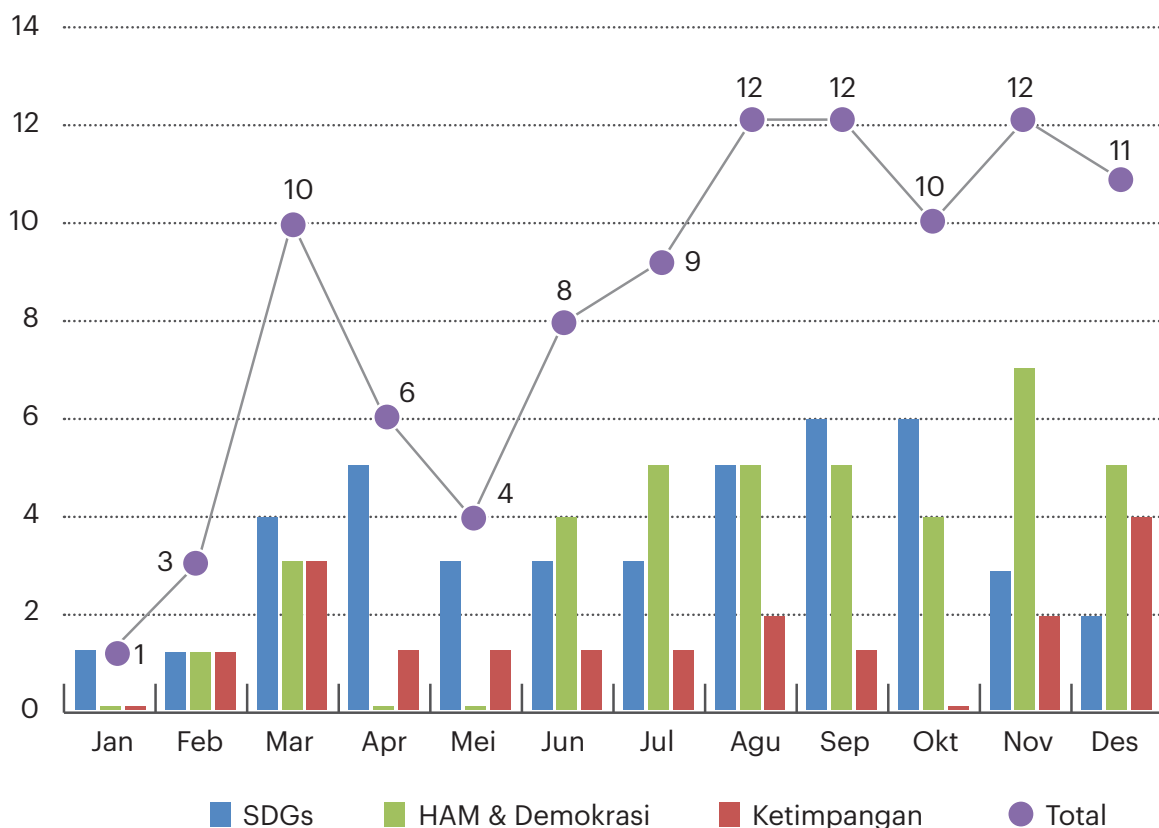
1.2. Tentang INFID

INFID berusia 31 tahun pada tahun 2016. Usia yang tidak lagi muda dalam mengawal demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Apalagi tantangan ke depan yang semakin tidak mudah untuk terus dilalui, dan untuk terus berjalan dalam mewujudkan Visi INFID yaitu mewujudkan demokrasi, kesejahteraan, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian serta terjamin dan terpenuhinya hak asasi manusia di tingkat nasional dan internasional.

Tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya, tahun 2016 ini INFID mengawal tiga isu besar, yaitu, pertama penurunan ketimpangan; kedua, pencapaian SDGs; dan ketiga, penegakan HAM dan demokrasi. Ketiga isu utama tersebut merupakan perwujudan misi INFID yang meliputi 1) menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai HAM, demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian melalui pendidikan publik;

2) melakukan penelitian dan kajian kebijakan; 3) melakukan dialog kebijakan untuk mendorong terciptanya kebijakan yang berpihak dan menjamin terpenuhinya HAM bagi seluruh masyarakat terutama kelompok miskin dan marginal berdasarkan nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial dan perdamaian; dan 4) bekerja sama dan melakukan jejaring kerja membangun solidaritas sosial di tingkat nasional dan internasional. Selama tahun 2016, sebanyak 98 kegiatan telah dilaksanakan dari tiga program tersebut. Kegiatan dilaksanakan di daerah, nasional dan internasional. Berikut grafik kegiatan INFID selama satu tahun.

Tabel 1. Jumlah Kegiatan INFID



Berdiri pada tahun 1985 sebagai sebuah forum yang beranggotakan organisasi masyarakat sipil baik yang ada di Indonesia maupun di internasional, sampai saat ini anggota INFID berjumlah 70 organisasi yang bergerak di berbagai isu seperti kesetaraan perempuan, keberlanjutan lingkungan, transparansi dan akuntabilitas, dan keadilan sosial bagi semua.

2 IMPLEMENTASI DAN CAPAIAN PROGRAM PADA TAHUN 2016

2.1. Program Sustainable Development Goals (SDGs)

Satu tahun sudah SDGs disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Sidang Umum PBB pada September 2015. Ada harapan SDGs akan dilaksanakan dengan cara dan metode yang berbeda dari Tujuan Pembangunan Global sebelumnya (*Millenium Development Goals*/MDGs). Harapan tersebut muncul manakala SDGs disusun dengan cara dan metode yang berbeda dari MDGs, melalui proses yang partisipatif dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan di dunia, termasuk kelompok masyarakat sipil. SDGs juga memberi harapan mengenai wajah dunia yang lebih baik dalam 15 tahun ke depan. Tidak ada lagi penduduk miskin, berkurangnya ketimpangan, dan lingkungan yang terlindungi dan berkelanjutan. Harapan tersebut ingin dicapai dengan memastikan tidak meninggalkan satu orang pun (*leave no one behind*).

Karena itu, SDGs akan mungkin tercapai jika dalam pelaksanaannya, seluruh pihak bekerja sama dalam melaksanakan SDGs. Kerja sama tersebut membutuhkan prasyarat, yaitu adanya institusi yang demokratis. Sebuah institusi yang transparan, akuntabel, dan inklusif, yang melibatkan seluruh aktor menjadi bagian dalam pelaksanaan sekaligus juga pengawasannya. Tanpa adanya institusi yang demokratis, SDGs hanya akan menjadi komitmen semata yang sulit untuk mencapai seluruh Tujuan yang telah ditetapkan.

Tidak hanya itu, pelaksanaan dan pencapaian SDGs akan tercapai jika ada kepemilikan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Kepemilikan yang kuat akan didapat jika terdapat pengetahuan dan pemahaman tentang SDGs serta manfaatnya dirasakan secara nyata.

Peran dan Posisi INFID

Kedua konteks inilah yang menjadi basis advokasi pelaksanaan SDGs selama tahun 2016, bersama dengan penyebaran informasi mengenai SDGs terutama kepada pemerintah dan masyarakat sipil di daerah. Meskipun dasar hukum pelaksanaan SDGs

belum dikeluarkan oleh pemerintah sampai akhir tahun 2016, program-program yang dijalankan INFID telah berhasil mendorong inisiatif berbagai pihak terutama pemerintah daerah dan universitas untuk melaksanakan SDGs.

Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah mengeluarkan Peraturan Bupati terkait dengan pelaksanaan SDGs dan juga membentuk sekretariat SDGs di lingkungan pemda. Kabupaten lain yaitu Kabupaten Pangkep telah mengeluarkan deklarasi bersama terkait dengan pelaksanaan SDGs bersama dengan masyarakat sipil, universitas dan swasta. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan SDGs.

Pihak lain yaitu universitas seperti Universitas Katolik (UNIKA) Widya Mandira, Kupang, telah melaksanakan seminar dan lokakarya SDGs bekerja sama dengan VIVAT Internasional. Beberapa universitas lain di Indonesia seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanudin, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Universitas Sebelas Maret dan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang juga mulai mengambil inisiatif untuk terlibat dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia.

INFID telah mengeluarkan dua panduan pelaksanaan SDGs, yaitu *Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah* dan *Panduan SDGs Khusus untuk Tujuan 10*, dengan tujuan mendorong pelaksanaan SDGs terutama di daerah. Informasi ini ditambah dengan paket-paket informasi yang dikeluarkan INFID mengenai SDGs ditambah dengan adanya Duta Masyarakat Sipil untuk SDGs yang terdiri atas M. Farhan (pekerja seni), Sophia Latjuba (pekerja seni), Abdul Kholiq Arif (mantan Bupati Wonosobo), Alissa Wahid (masyarakat sipil), dan Zumrotin K. Susilo (masyarakat sipil). Secara keseluruhan sebanyak 43 kegiatan dilaksanakan di bawah program SDGs baik di nasional maupun internasional, yang dihadiri lebih dari 300 orang dari berbagai kalangan.

2.2. Program Penurunan Ketimpangan

Bisa dikatakan agenda penurunan ketimpangan telah menjadi agenda pembangunan nasional. Bukan hanya penurunan ketimpangan, yang ditandai dengan penurunan rasio gini telah menjadi target di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Pemerintahan Jokowi–Jusuf Kalla untuk periode 2014–2019. Penurunan ketimpangan juga menjadi target dan indikator keberhasilan pengelolaan APBN 2016.

Diskursus berikutnya adalah bagaimana dan dengan metode apa ketimpangan bisa diturunkan. Kebijakan ataupun program apa yang tepat untuk menurunkan ketimpangan, bukan hanya menurunkan ketimpangan untuk sesaat atau dalam kurun waktu tertentu saja, namun menurunkan ketimpangan yang lebih berkelanjutan. Hal-hal inilah yang menjadi fokus advokasi INFID pada tahun 2016.



Festival HAM 2016
Bojonegoro, 30 November - 2 Desember 2016

Peran dan Posisi INFID

Dua isu utama yang diangkat INFID untuk menurunkan ketimpangan, yaitu kebijakan perpajakan dan perluasan kesempatan kerja. Kebijakan perpajakan menjadi penting karena selama ini pajak hanya dilihat sebagai sumber penerimaan negara tanpa melihat fungsi keadilan. Kenyataannya, sistem pajak yang tidak adil di mana tarif pajak orang kaya terlalu rendah dari yang seharusnya dibayarkan, kemudian banyaknya insentif pajak yang diterima korporasi ketimbang masyarakat terutama kelompok perempuan. Demikian halnya dengan pentingnya Indonesia mendorong kerja sama perpajakan internasional yang lebih adil melalui kerja sama G-20. Kebijakan lain yang diusulkan INFID terkait dengan penurunan ketimpangan adalah perluasan kerja melalui perluasan akses dan mutu pelatihan kerja. Perluasan kesempatan kerja penting karena berkontribusi terhadap ketimpangan pendapatan.

Bersama dengan koalisi masyarakat sipil untuk pajak berkeadilan, INFID memberikan respons terhadap *Panama Papers* yang memuat nama-nama orang kaya dan pejabat publik di Indonesia. Selain itu, INFID bersama dengan masyarakat sipil dari tujuh negara mengeluarkan usulan terkait dengan kerja sama perpajakan di G-20 yang telah disampaikan di pertemuan G-20 di RRT, juga disampaikan ke Sherpa Indonesia. Sementara untuk perluasan kesempatan kerja, INFID berhasil mengajak kerja sama BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan seminar satu hari mengenai Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Menurunkan Ketimpangan melalui Perluasan Akses dan Mutu Pelatihan Kerja. Secara keseluruhan sebanyak 17 kegiatan telah diselenggarakan terkait dengan program penurunan ketimpangan.

2.3. Program HAM dan Demokrasi

Tiga isu utama di bidang HAM dan Demokrasi menjadi fokus perhatian INFID pada tahun 2016. Tiga isu tersebut meliputi praktek HAM di kabupaten/kota, praktek bisnis dan pengelolaan sumber daya alam yang berbasiskan pada HAM, dan intoleransi dan radikalisme. Meskipun pemenuhan HAM di tingkat nasional masih menjadi tantangan, juga belum adanya perhatian pelaku usaha atas pemenuhan HAM, ditambah dengan belum tuntasnya praktek-praktek pelanggaran HAM masa lalu, beberapa tokoh di daerah seperti Kabupaten Wonosobo, Palu, Lampung Timur, dan Bojonegoro muncul dengan contoh-contoh baik yang memberi inspirasi bagi pembangunan di daerah lain. Kabupaten Wonosobo berhasil mengurangi angka kematian ibu dan anak, menurunkan persentase keluarga berpenghasilan rendah yang tidak memiliki rumah, dan program. Kabupaten Wonosobo juga telah menerbitkan Perda Kabupaten Ramah HAM. Sementara itu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, telah menunjukkan komitmennya dalam pemenuhan HAM bagi masyarakat di Kota Palu melalui penerbitan Peraturan Wali Kota Palu mengenai Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Tantangan yang tidak kalah beratnya juga terjadi dalam demokrasi di Indonesia. Keberagaman yang menjadi napas demokrasi berhadapan dengan gerakan yang mendesakkan satu paham di tengah berlangsungnya kontestasi politik. Gerakan tersebut kemudian mendorong kelompok-kelompok sektarian menggunakan politik identitas untuk menggerus demokrasi yang tengah berjalan. Kondisi tersebut bukan hanya mengancam demokrasi, melainkan juga ke-Indonesiaan itu sendiri mengingat identitas Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari beragamnya suku, agama, dan kepercayaan.

Peran dan Posisi INFID

Terkait dengan tiga isu tersebut, INFID memainkan dua peran, yaitu menghasilkan informasi sekaligus mendistribusikannya sehingga menjadi pengetahuan bagi masyarakat; dan menjalin kerja sama, mengkritisi, dan menawarkan peluang-peluang dalam sebuah isu atau program yang menjadi advokasi INFID. Dua pendekatan tersebut dilakukan bersama yang menghasilkan adanya kerja sama INFID dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan Festival HAM. Capaian lain dari program HAM dan demokrasi adalah kontribusi INFID dalam melahirkan dua peraturan daerah baru yaitu Peraturan Daerah Bupati Wonosobo dan Peraturan Bupati Lampung Timur terkait dengan Kota Ramah HAM. Capaian lain adalah terbentuknya jaringan Asian Local Democracy and Human Rights Cities Network.

Sejumlah informasi penting juga dihasilkan seperti Panduan Kabupaten dan Kota Ramah HAM, Panduan Pelatihan Bisnis dan HAM, dan juga laporan penelitian mengenai toleransi dan radikalisme di Indonesia. Keseluruhan capaian tersebut dihasilkan dari 38 kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun baik di daerah, nasional, maupun internasional.

3

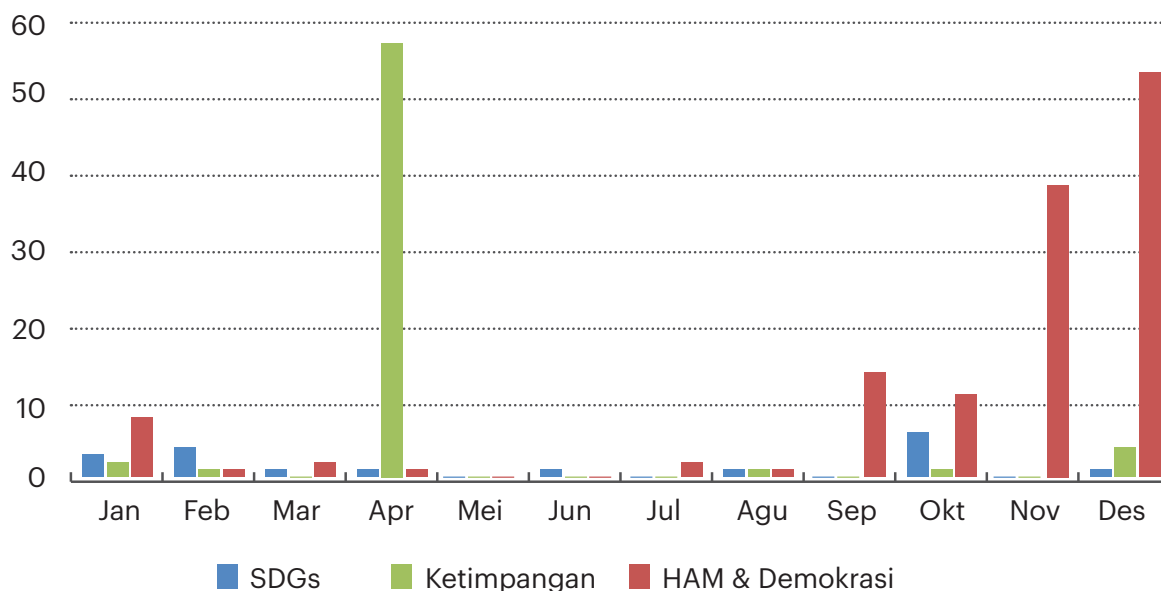
INFID DALAM MEDIA

3.1. Media Masa

Sepanjang tahun 2016, 19 siaran pers dikeluarkan INFID bersama dengan anggota dan jaringan INFID seperti Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs dan Forum Pajak Berkeadilan. Sebanyak 219 pemberitaan di media massa baik media cetak maupun media *online*. Liputan media tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan liputan media terhadap kegiatan INFID pada tahun 2015 yang mencapai 118 pemberitaan.

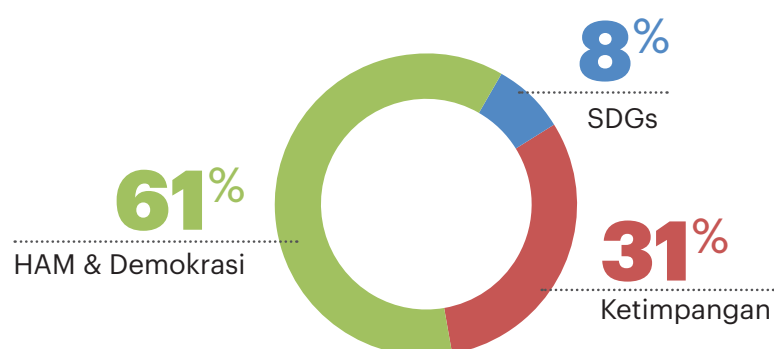
Liputan tertinggi terjadi pada April dan Desember. Pada April, INFID bersama dengan Koalisi Pajak Berkeadilan mengeluarkan respons atas laporan yang dikeluarkan oleh The International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) mengenai orang-orang kaya dan juga pejabat publik yang memiliki rekening di Panama, sebuah negara di Amerika Tengah, yang dikenal dengan *Panama Papers*. Sementara pada Desember, liputan media tertuju pada festival HAM yang diselenggarakan INFID bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Kota Bojonegoro. Berikut gambaran liputan media dari tiap-tiap program berdasarkan bulan.

Tabel 2. Liputan Media Berdasarkan Program



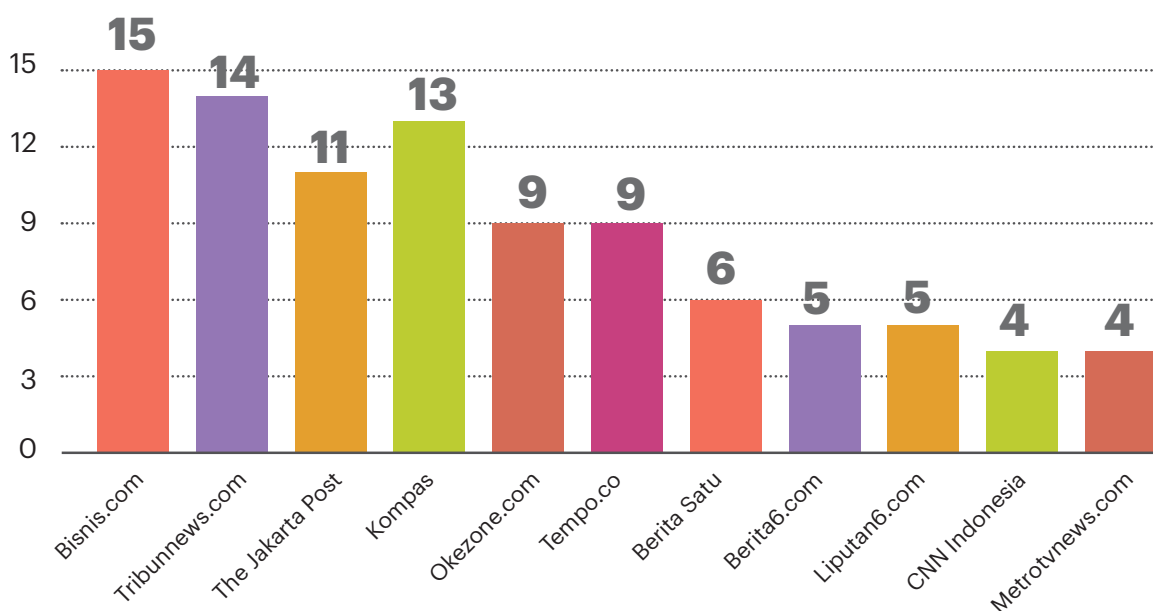
Secara keseluruhan, program yang paling banyak diliput oleh media adalah program HAM dan demokrasi dengan liputan sebanyak 133, diikuti dengan program ketimpangan 67 berita, dan SDGs sebanyak 18 berita. Itu berarti, liputan media tertinggi atau sebesar 61% mengenai HAM dan demokrasi, diikuti oleh ketimpangan (31%) dan SDGs (8%) seperti yang digambarkan di tabel di bawah ini. Dua peristiwa penting yang mempengaruhi tingginya liputan media mengenai HAM dan demokrasi karena 1) festival HAM yang diselenggarakan pada Desember 2016, dan 2) respons INFID terhadap politik identitas terkait dengan Pilkada di DKI Jakarta.

Tabel 3. Persentase Liputan Media Berdasarkan Program INFID



Tabel di bawah ini menggambarkan media yang meliput baik kegiatan maupun pendapat INFID terutama terkait dengan tiga isu utama INFID. Terbanyak adalah *Bisnis Indonesia*, diikuti oleh *Kompas*, *Tribunnews.com*, *The Jakarta Post*, dan media lain.

Tabel 4. Media yang Memberitakan Kegiatan dan Opini INFID

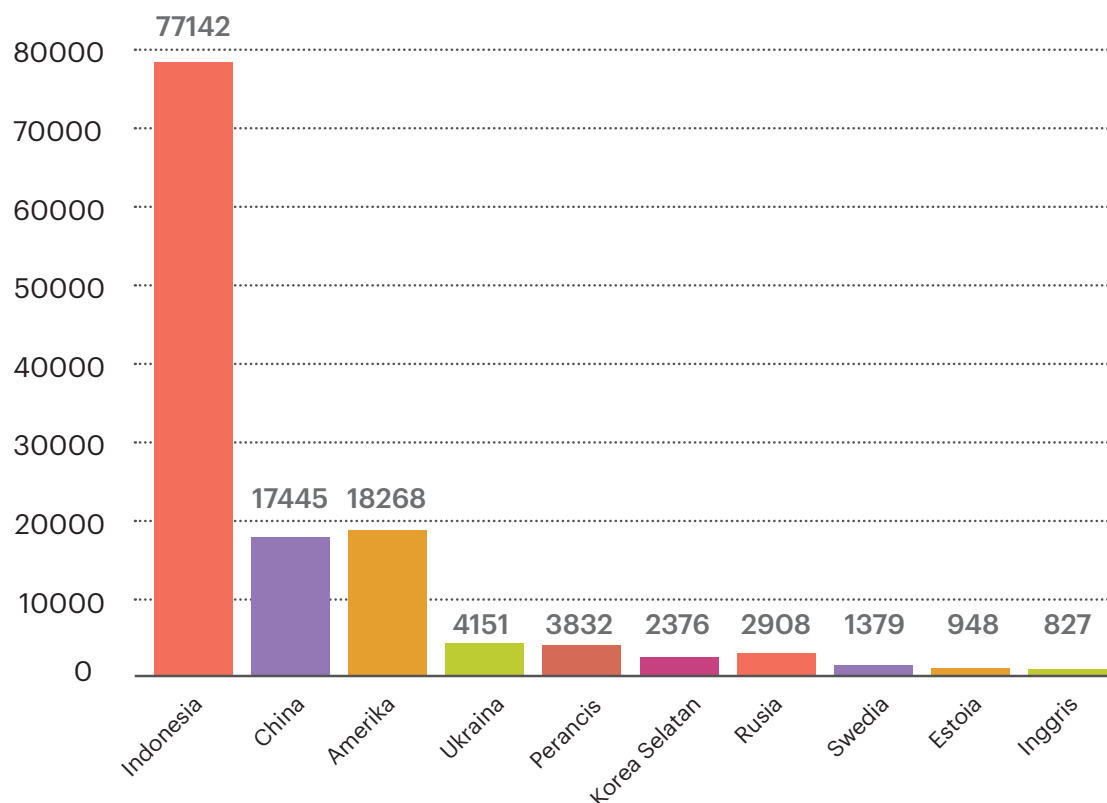


Bisa dikatakan, terdapat peningkatan perhatian media terhadap kegiatan yang diselenggarakan INFID pada tahun 2016. Peningkatan tersebut menunjukkan keberhasilan INFID dalam menarik media melalui kegiatan yang diselenggarakannya. Perhatian media bukan hanya pada kegiatan yang diselenggarakan oleh INFID, melainkan INFID juga telah menjadi narasumber oleh beberapa media. Misalnya pada isu ketimpangan, beberapa media menjadikan INFID sebagai narasumber terkait dengan kebijakan penurunan ketimpangan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

3.2. INFID dalam Media Sosial

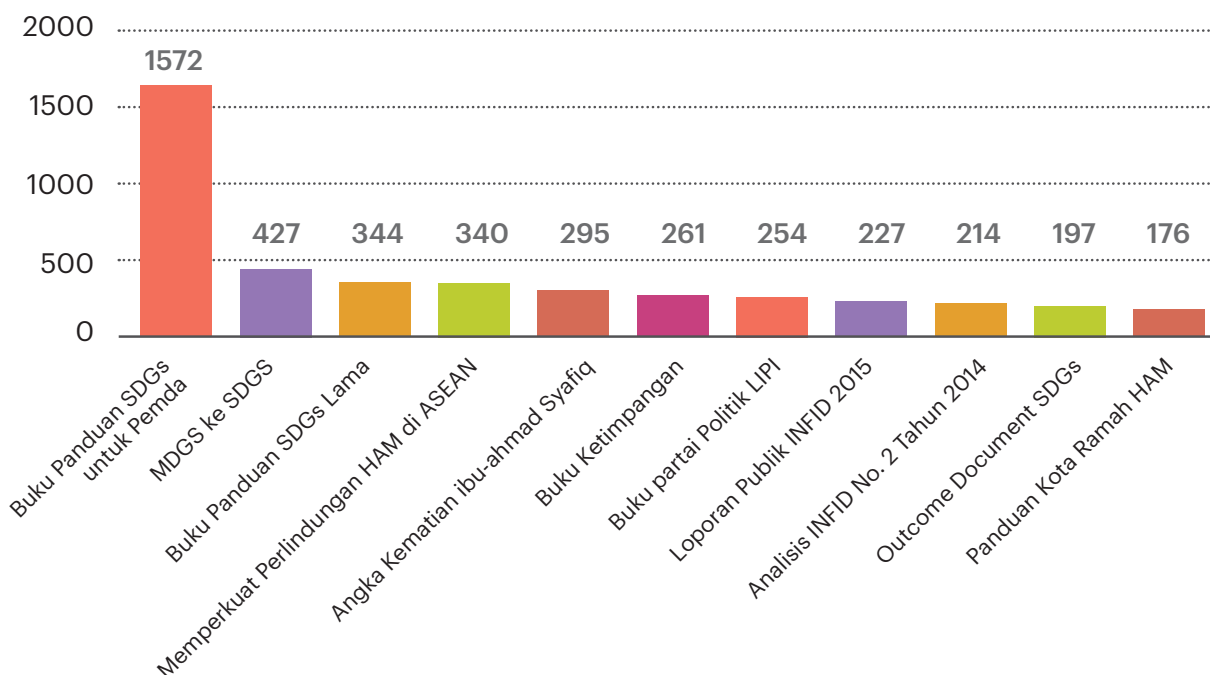
Total pengunjung *website* INFID selama tahun 2016 mencapai 122.031 pengunjung atau rata-rata per bulan mencapai 10.169 pengunjung per bulan, meningkat drastis dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 61.689 pengunjung. Pengunjung tertinggi terjadi pada Maret yang mencapai 20.160, diikuti Mei sebanyak 19.160, dan April mencapai 16.241. Sebagian besar pengunjung berasal dari Indonesia, kemudian Republik Tiongkok, dan Amerika Serikat. Seperti yang digambarkan di tabel di bawah ini.

Tabel 5. Pengunjung Website INFID per Bulan



Berdasarkan materi yang diunduh dari website INFID, tertinggi adalah paper diskusi mengenai SDGs yang diunduh sebanyak 1.572 kali selama satu tahun, diikuti oleh kajian dari MDGs ke SDGs, dan Panduan SDGs untuk kabupaten/kota, seperti yang ada di tabel di bawah ini.

Tabel 6. Materi yang Diunduh di Website INFID



Untuk media sosial, jumlah pengikut akun INFID di *Facebook* juga meningkat dari sebelumnya pada tahun 2015 sebanyak 6.965 menjadi 7.094. Demikian halnya dengan pengikut *Twitter* yang terdapat penambahan dari 1.277 pada tahun 2015 menjadi 1.898. Meskipun demikian, kenaikan tersebut dianggap lamban jika dibandingkan dengan meningkatnya kunjungan *website* INFID dan juga liputan media terhadap kegiatan dan pendapat INFID. Karena itu, perbaikan strategi di bidang media khususnya media sosial menjadi salah satu pekerjaan rumah INFID pada tahun mendatang.

4

PENGUATAN KELEMBAGAAN

4.1. Respons Pemerintah dan Jaringan INFID terhadap Program yang Dijalankan INFID

Dalam menjalankan program SDGs dan HAM, respons pemerintah dan jaringan INFID terhadap INFID mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Karena itu pada tahun ini INFID mengadakan hubungan kerja sama program dengan instansi pemerintah di pusat dan daerah. Hubungan kerja sama tersebut dituangkan ke dalam nota kesepahaman dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan universitas yaitu:

- a. Nota Kesepahaman INFID dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang diwakili oleh Bupati Bojonegoro, H. Suyoto, bersepakat menyelenggarakan Konferensi Nasional Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia (HAM) pada 29 November – 3 Desember 2016, Kegiatan penyelenggaraan menyangkut kepanitian bersama, penyusunan kerangka acuan kerja, dan penganggaran serta keterlibatan *sponsorship* dalam kegiatan Konferensi Kabupaten Ramah HAM. Nota kesepahaman berlaku dari April 2016 hingga Desember 2016.
- b. Nota Kesepahaman INFID dengan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Staf Kepresidenan; Teten Masduki. Nota kesepahaman menyangkut: i) pertukaran data dan informasi; Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs) termasuk untuk mendorong peran serta dari pemerintah daerah, universitas dan CSO dan keterbukaan pemerintah (*open government*), ii) Bantuan teknis dan analisis terkait SDGs dan *open government*, iii) Kegiatan dalam bentuk lain yang disepakati oleh para pihak kemudian hari. Nota kesepahaman berlaku tiga tahun dari 25 Agustus 2016 – 25 Agustus 2018.
- c. Nota Kesepahaman INFID dengan Universitas Airlangga yang diwakili oleh Rektor Universitas Airlangga (UNAIR). Nota kesepahaman bertujuan untuk mengembangkan Sistem Penanganan Konflik Kepentingan dalam pelaksanaan akademik dan nonakademik di Universitas Airlangga. Nota kesepahaman berlaku tiga bulan dari 10 November 2016 hingga 30 Januari 2017.

Dengan adanya nota kesepahaman tersebut, INFID mendapat kepercayaan lebih baik dari jaringan, pemerintah, dan pihak-pihak terkait, sehingga program-program dapat berjalan dengan baik.

4.2. INFID dan Jaringan Masyarakat Sipil

Tahun ini sebanyak 32 pertemuan yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil di tingkat nasional maupun daerah dan juga internasional, pemerintah dan swasta dihadiri oleh INFID. Hampir di semua pertemuan tersebut, INFID memberikan masukan dari tiga program INFID (detail kegiatan di lampiran). Selain aktif memberikan usulan berupa ide dan gagasan di berbagai pertemuan yang diselenggarakan oleh anggota, jaringan dan mitra, INFID juga terlibat aktif di berbagai koalisi masyarakat sipil seperti Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pajak Berkeadilan, Koalisi Responsibank, Koalisi Indonesia Beragam, dan Koalisi KPPK yang berfokus pada pelanggaran HAM masa lalu. INFID juga aktif menginisiasi jaringan baru di tingkat internasional yaitu Asia LDC net yang beranggotakan Indonesia, Filipina, Korea Selatan, Jepang dan Mongolia. Indonesia bersama dengan Korea Selatan menjadi koordinator di jaringan LDC Net.

4.3. Kepercayaan Perguruan Tinggi dalam Proses Magang Mahasiswa

Tahun 2016 banyak mahasiswa yang melamar untuk magang di INFID dengan mengambil isu HAM dan SDGs, tetapi penerimaan mahasiswa magang tetap dilakukan melalui seleksi berdasarkan minat dan kemampuannya menulis. Berikut mahasiswa yang mendapatkan kesempatan magang di INFID:

- a. Marcella Karina Ratnaputri: Universitas Parahyangan Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional. Periode magang: 18 Juli 2016 – 18 September 2016, isu yang diminati HAM dan Demokrasi;
- b. Hendro Prasetyo: Universitas Brawijaya, Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional, periode magang: 20 Juli 2016 – 20 September 2016, isu yang diminati SDGs dan *inequality*;
- c. Meila Riskia Fitri: lulus S-2 Sosiologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, sebagai *research inter*, periode magang: 2 Agustus 2016 – 2 Oktober 2016 (dua bulan), isu yang diminati SDGs dan *inequality*
- d. Evit Dwi Sulistyowati: lulus S1, Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia, periode Magang: 8 November 2016 – 8 Februari 2017, isu yang diminati SDGs *focus gender & development*;

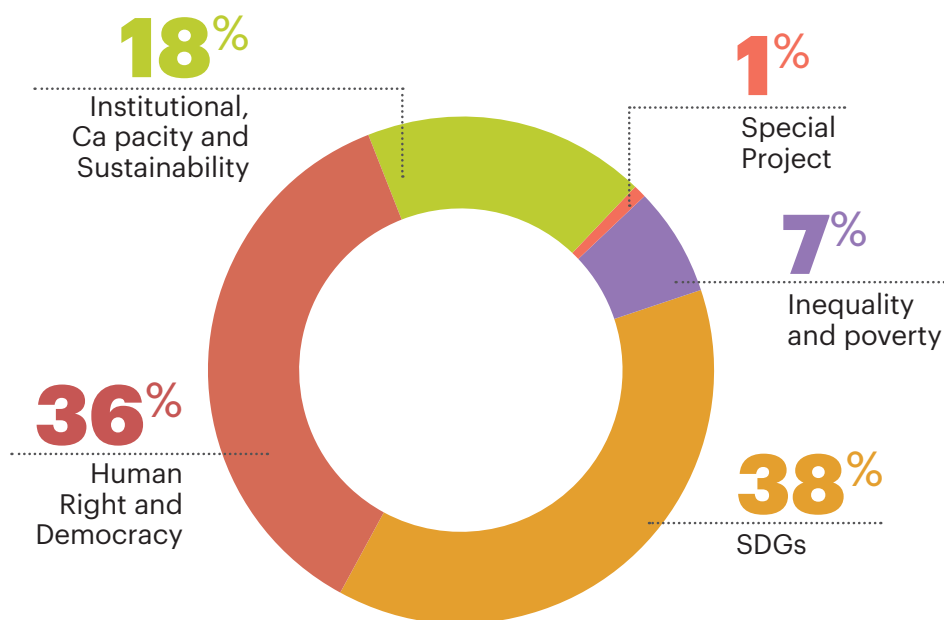
Melihat dari minat perguruan tinggi yang merekomendasikan mahasiswanya magang di INFID, maka hal tersebut merupakan kepercayaan mereka terhadap INFID sebagai NGO yang dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswanya.

5 LAPORAN KEUANGAN

Total dana yang dikelola INFID selama tahun 2016 sebesar Rp 11.950.885.720. Dana tersebut berasal dari enam mitra kerja INFID, yaitu Ford Foundation, MAMPU-Cowater, OXFAM – Uni Eropa, Kedutaan Inggris, Development and Peace, dan Yayasan TIFA. Sisanya berasal dari kerja sama dengan pihak lain seperti BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diuraikan di tabel di bawah ini.

Dana terbesar atau 37% untuk program HAM dan demokrasi, diikuti dengan program SDGs yang mencapai 33%, kemudian kelembagaan sebesar 19%. Anggaran program ketimpangan paling sedikit pada tahun 2016 ini yaitu 7% dari total dana, seperti yang digambarkan di tabel di bawah ini.

Tabel 8. Persentase Anggaran untuk Tiap-Tiap Program



No. : PHHAAS/713/MA/Ary/2017

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Dewan Pengurus
**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**

Board of Trustees
***International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)***

Kami telah mengaudit laporan keuangan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, serta laporan aktivitas dan perubahan aset bersih dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying financial statements of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), which comprise the statement of financial position as of 31 December 2016, and the statements of activities and changes in net assets and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Management's responsibility for the financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan keuangan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 diaudit oleh Auditor Independen lain yang dalam laporannya No. 030-JKP/INFID-1/III/16 tertanggal 23 Maret 2016 menyajikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) as of 31 December 2016, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with, the Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

Financial statements of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) for the year ended 31 December 2015 were audited by other Independent Auditors whose report No. 030-JKP/INFID-1/III/16 dated 23 March 2016 expressed an Unqualified Opinion on those financial statements.

Hal lain (lanjutan)

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) secara keseluruhan. Laporan penerimaan dan beban yang berkaitan dengan dana para donor tidak merupakan bagian yang diharuskan dari laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah disajikan untuk informasi tambahan. Informasi tersebut telah menjadi obyek prosedur yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan; dan, menurut pendapat kami menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan secara keseluruhan.

Other matter (continued)

Our audits were conducted for the purpose of forming an opinion on the financial statements of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) taken as a whole. The income and expenditures statements pertaining to donors funds are not a required part of financial statements in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia and have been presented for additional information. Such information has been subjected to procedures applied in the audit of the financial statements; and in our opinion is fairly stated in all material respects in relation to the financial statements taken as whole.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan



Drs. Theo Kusnawara, Ak., CA, CPA

Izin Akuntan Publik/ *Public Accountant License* No. AP.0258

Izin Usaha KAP/ *Business License* No. 819/KM.1/2015

10 Juli/ *July* 2017

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2016	2015 ^(*)	
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	2c, 3	3,866,980,734	2,202,499,152	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain	4	97,193,517	14,736,200	Other receivables
Uang muka program	5	185,995,402	358,595,345	Advance program
Jumlah aset lancar		4,150,169,653	2,575,830,697	Total current assets
Aset tidak lancar				Non current assets
Aset tetap	2d, 6			Fixed assets
Biaya perolehan		840,210,718	644,559,440	Acquisition cost
Akumulasi depresiasi		(398,040,397)	(465,347,714)	Accumulated depreciation
Jumlah aset tidak lancar		442,170,321	179,211,726	Total non current assets
Jumlah aset		4,592,339,974	2,755,042,423	Total assets

^(*) Disajikan kembali, lihat catatan 12

^(*) Restated, see note 12

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara
keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements
form an integral part of these financial statements.

International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)
Laporan posisi keuangan (lanjutan)
Pada tanggal 31 Desember 2016

International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)
Statements of financial position (continued)
As of 31 December 2016

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2016	2015 ^(*)	
Liabilitas dan aset bersih				Liabilities and net assets
Liabilitas				Liability
Hutang lainnya		602,605,287	16,666,403	Other payables
Biaya yang masih harus dibayar	7	958,873,690	349,323,686	Accrued expenses
Hutang pajak	8	24,418,369	61,453,338	Tax Payable
Jumlah liabilitas		1,585,897,346	427,443,427	
Aset bersih				Net assets
Terikat		1,248,439,206	1,254,950,013	Restricted
Tidak Terikat		1,758,003,422	1,072,648,983	Unrestricted
Jumlah aset bersih		3,006,442,628	2,327,598,996	Total net assets
Jumlah liabilitas dan aset bersih		4,592,339,974	2,755,042,423	Total liabilities and net assets

^(*) Disajikan kembali, lihat catatan 12

^(*) Restated, see note 12

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara
keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements
form an integral part of these financial statements.

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**
Laporan aktivitas
Untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2016

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**
Statements of activities
For the year ended
31 December 2016

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2016			2015 ^(*)
		Restricted	Unrestricted	Total	Total
PENERIMAAN	2e, 9				RECEIPTS
Dana dari donor		8,307,404,657	96,300,000	8,403,704,657	4,308,716,369
Donor lain		967,800,948	-	967,800,948	1,665,561,716
Dana dari non donor		91,597,132	2,641,966,785	2,733,563,917	3,011,542,561
Jumlah penerimaan		9,366,802,737	2,738,266,785	12,105,069,522	8,985,820,646
					<i>Fund from donors</i>
					<i>Other donors</i>
					<i>Fund from non donors</i>
					<i>Total receipts</i>
BEBAN PROGRAM	2e, 10, 11				PROGRAM EXPENDITURES
Penelitian dan publikasi		2,199,723,629	238,823,409	2,438,547,038	1,402,138,914
Tindakan advokasi/politik		1,968,664,830	220,247,416	2,188,912,246	2,758,077,987
Publikasi, dokumentasi, dan informasi		104,180,000	-	104,180,000	97,929,475
Pengembangan kapasitas		1,542,336,306	50,000,000	1,592,336,306	436,250,478
Biaya Personel		2,737,929,000	203,820,000	2,941,749,000	1,997,166,139
Institusional		203,564,541	826,667,020	1,030,231,561	602,951,713
Layanan administrasi umum		616,915,238	381,221,584	998,136,822	702,815,633
Pengeluaran proyek khusus		-	132,132,917	132,132,917	90,489,578
Jumlah kegiatan program		9,373,313,544	2,052,912,346	11,426,225,890	8,087,819,917
					<i>Research and publication</i>
					<i>Advocacy/political action</i>
					<i>Publication, documentation, and information</i>
					<i>Capacity development</i>
					<i>Personnel cost</i>
					<i>Institutional</i>
					<i>Administration general service</i>
					<i>Special project expenditure</i>
					<i>Total program activities</i>
Perubahan dalam aset bersih		(6,510,807)	685,354,439	678,843,632	898,000,729
					<i>Changes in net asset</i>

^(*) Disajikan kembali, lihat catatan 12

^(*) Restated, see note 12

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**
Laporan perubahan aset bersih
Untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2016

**International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)**
Statements changes in net assets
For the year ended
31 December 2016

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	Restricted	Unrestricted	Total	
Aset bersih, 1 Januari 2015		1,186,088,093	124,830,834	1,310,918,927	Net assets, 1 January 2015
Perubahan dalam aset bersih ^(*)		(11,374,321)	909,375,049	898,000,728	Changes in net assets ^(*)
Koreksi		80,236,241	38,443,100	118,679,341	Correction
Aset bersih, 31 Desember 2015		1,254,950,013	1,072,648,983	2,327,598,996	Net assets, 31 December 2015
Perubahan dalam aset bersih		(6,510,807)	685,354,439	678,843,632	Changes in net assets
Aset bersih, 31 Desember 2016		1,248,439,206	1,758,003,422	3,006,442,628	Net assets, 31 December 2016

^(*) Disajikan kembali, lihat catatan 12

^(*) Restated, see note 12

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)
Laporan arus kas
Untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2016

International NGO Forum on Indonesian
Development (INFID)
Statements of cash flows
For the year ended
31 December 2016

(Disajikan dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	2016	2015 (*)	
Arus kas dari aktivitas operasi			Cash flows from operating activities
Perubahan dalam aset bersih	678,843,632	898,000,729	Changes in net assets
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aset bersih menjadi kas bersih yang digunakan dalam aktivitas operasi:			Adjustment to reconcile changes in net assets to net cash used in operating activities:
Rugi atas pengurangan aset tetap	9,853,250	-	Loss on disposal fixed assets
Biaya depresiasi	101,323,933	41,183,764	Depreciation expense
(Kenaikan)/penurunan piutang	(82,457,317)	162,040,875	(Increase)/decrease in receivables
(Kenaikan)/penurunan advance	172,599,944	(345,745,156)	(Increase)/decrease in advance project
Kenaikan/(penurunan) hutang Program	1,012,763,886	(287,318,147)	Increase/(decrease) in account payable program
Kenaikan hutang non-program	182,725,001	117,920,586	Increase in account payable non program
Kenaikan/(penurunan) hutang Pajak	(37,034,969)	52,731,634	Increase/(decrease) in tax payable
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	2,038,617,360	638,814,285	Net cash provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi			Cash flows from investing activities
Pembelian aset tetap	(374,135,778)	(111,569,400)	Purchase of fixed assets
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(374,135,778)	(111,569,400)	Net cash used in investing activities
Kenaikan kas dan setara kas bersih	1,664,481,582	527,244,885	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas, awal tahun	2,202,499,152	1,675,254,267	Cash and cash equivalents, at beginning of year
Kas dan setara kas, akhir tahun	3,866,980,734	2,202,499,152	Cash and cash equivalents, at end of year

(*) Disajikan kembali, lihat catatan 12

(*) Restated, see note 12

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

6 LAMPIRAN-LAMPIRAN

6.1. Policy Wish List 2016



No.1/Tahun 2016

POLICY WISH LIST 2016

HARAPAN PERUBAHAN & PERBAIKAN KEBIJAKAN INFID TAHUN 2016

Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG)

Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Sambutannya di Debat Tahunan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan pentingnya memastikan SDG yang tepat waktu dan memastikan strategi pembangunan dunia yang sejalan dengan kondisi dan prioritas negara. Ini salah satu upaya pemerintah untuk tidak mengulang kesalahan yang sama dengan implementasi MDGs sebelumnya yang terlambat dilakukan.

Presiden Jokowi juga telah bertemu dengan Sekjen PBB di Paris bulan Desember dan perwakilan Kelompok Masyarakat Sipil membahas SDGs pada tanggal 17 Desember 2015 lalu. Berikut langkah kebijakan penting untuk dilakukan pada tahun 2016:

1. Presiden Jokowi/Presiden akan membuat **keputusan resmi** dalam bentuk **Perpres SDG** dan Rencana Aksi SDG sebagai awal pelaksanaan SDG 2016-2030.
2. Pemerintah memutuskan pelaksanaan SDG dilaksanakan secara partisipatif. Perpres SDG akan memuat metode kerja baru partisipatif dalam bentuk **Panitia bersama** yang terdiri dari (a) Panitia Pengarah dan (b) Panitia Pelaksanaan. Panitia bersama melibatkan masyarakat sipil, kelompok bisnis, kelompok perempuan.
3. Pemerintah Daerah menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan SDG. Maka pemerintah mesti menyediakan dukungan teknis dan insentif fiskal kepada 500 kota dan kabupaten di Indonesia, khususnya Kota dan Kabupaten yang memiliki **angka kematian ibu tinggi dan tertinggi, angka kematian balita tinggi dan tertinggi**, kota dan kabupaten dengan cakupan **sanitasi dan air minum** yang rendah dibawah 60%.

**) POLICY WISH LIST 2016 disusun sebagai bahan masukan kepada Pemerintah, Presiden Jokowi dan para menteri*

Bahan-bahan penulisan berdasarkan sumber-sumber media dan kajian yang dapat dipercaya. Kesimpulan dan rekomendasinya diupayakan dapat diuji dan diperdebatkan. Tujuannya untuk menyuarakan usulan-usulan kelompok masyarakat sipil Indonesia dan warga negara untuk pembangunan yang lebih Inklusif, untuk semua dan melindungi hak asasi manusia.

Tim penyusun:

Sugeng Bahagijo, Beka Ulung Hapsara, Siti Khoirun Nikma, Mugiyanto, Hamong Santono, dan Sekar Panuluh.

****) Diperkenankan untuk mengutip dengan menyebut judul dokumen dan nama penyusun.**

Menurunkan Ketimpangan

Salah satu kendala utama untuk mencapai pembangunan ialah tingginya angka ketimpangan di Indonesia. Presiden Joko Widodo pada 10 Januari menyebutkan, “Ketimpangan yang terjadi juga akan berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan.” Sejalan dengan tujuan dan target penurunan ketimpangan, Presiden Jokowi telah menekankan agar pemerintah dapat memberikan layanan pendidikan dan layanan kesehatan kepada warga. Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam dua kesempatan berbeda yaitu pada Debat Tahunan Sidang Umum PBB dan Universitas Paramadina telah menyatakan bahwa Ketimpangan di Indonesia sudah berada pada status “Lampu Kuning”.

Untuk mengatasi Ketimpangan, INFID menyampaikan beberapa usulan:

4. **Percepatan penyusunan aksi penurunan ketimpangan** sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dimana Pemerintah menargetkan akan menurunkan ketimpangan dari rasio gini 0,41 menjadi 0,36. Saat ini penyusunan rencana aksi sedang dilakukan Bappenas, namun perlu ada percepatan karena target penurunan rasio gini tersebut cukup ambisius sehingga diperlukan langkah-langkah yang ambisius pula untuk mencapai target tersebut
5. **Pemerintah menyusun rencana aksi untuk mengatasi penghindaran pajak** yang menurut studi dari *Global Finance Integrity* Indonesia kehilangan penerimaan pajak lebih dari Rp 2.000 triliun (188 juta USD) sebagai akibat penghindaran pajak oleh perusahaan asing dan nasional selama tahun 2003 hingga 2013. Amnesti pajak yang akan diberlakukan kurang efektif karena sifatnya *voluntary*.
6. **Meningkatkan akses permodalan pelaku usaha kecil dan menengah** dengan suku bunga yang rendah dan kemudahan dalam jaminan kredit. Dalam hal ini, pemerintah bisa mendorong adanya dukungan pembiayaan jangka panjang bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dimana pemerintah bisa bertindak sebagai penjamin bagi pelaku-pelaku UMKM.
7. Pemerintah memperbesar alokasi **anggaran untuk belanja sosial dan jaminan sosial** untuk memperkuat cakupan dan manfaat dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sedikitnya **2 persen** PDB atau 150-250 Triliun harus dialokasikan.
8. Pemerintah memperluas dan memperbaharui **program-program pemagangan kerja, pelatihan kerja, dan informasi kerja** untuk menyerap angkatan kerja muda yang jumlahnya lebih dari 2 juta orang per tahun (lulusan SMP/SMA/Perguruan Tinggi).
9. Pemerintah mengusulkan Rancangan **Undang-undang Kesetaraan Gender** dalam rangka penurunan angka kematian ibu, penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan mempercepat mobilitas perempuan di perkotaan dan pedesaan.
10. Pemerintah memperkuat **personalia dan anggaran** dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk lebih mampu dan berdaya melaksanakan

Undang-undang Kesetaraan Gender. Terutama untuk tugas-tugas (i) melakukan pemantauan dan advokasi untuk penurunan kekerasan kepada perempuan dan anak; (ii) advokasi kesetaraan upah dan kondisi kerja bagi pekerja perempuan dan pekerja rumah tangga.

Human Rights City dan Bisnis & Hak Asasi Manusia (HAM)

Dalam pidato Peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia, di Istana Negara, 11 Desember 2015, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan pentingnya jaminan atas hak politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya, dan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai penghormatan dan penegakkan terhadap HAM. Pada kesempatan yang sama, Presiden telah memberikan komitmen bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, salah satunya melalui melakukan rekonsiliasi dan terobosan penyelesaian baik dalam jalur yudisial maupun non yudisial.

Presiden juga menekankan pentingnya peran **pemerintah daerah** dalam upaya pemenuhan HAM, lebih lanjut Presiden telah memberikan dukungan pelaksanaan dan perbanyakan kota dan kabupaten yang ramah HAM di seluruh Indonesia.

Untuk memastikan kebijakan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia, INFID memberikan beberapa usulan yakni:

11. **Pemerintah mengeluarkan kebijakan penyelesaian penanganan pelanggaran HAM masa lalu melalui sebuah Peraturan Presiden (Perpres).** Komitmen ini sudah dinyatakan oleh pemerintah (Presiden). Diperlukan monitoring dan advokasi terus menerus oleh kelompok korban dan organisasi HAM.
12. **Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan peraturan (Permenkumham)** yang merupakan revisi atas Permenkumham No. 25 tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Revisi ini termasuk dengan memasukkan kriteria-kriteria yang lebih menyeluruh dan komprehensif sebagaimana diusulkann oleh CSO (INFID, Elsam, dll)
13. **Pemerintah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional mengenai Bisnis dan HAM.** Rencana Aksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diatur oleh Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (*UN Guiding Principles on Business and Human Rights*) yang disahkan tahun 2011.
14. Pemerintah konsisten melakukan penindakan yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN yang melakukan pelanggaran hukum termasuk pengemplangan pajak, pembakaran hutan dan pelanggaran hukum lingkungan, misalnya dengan melakukan gugatan hukum.

Partisipasi Warga dan Antikorupsi

15. Pemerintah melansir **kebijakan Partisipasi publik** untuk melembagakan partisipasi warga negara dalam hal Penganggaran, Legislasi, Kinerja Pembangunan. **Kelembagaan Partisipasi** akan membuka dan memperluas partisipasi warga secara nyata dan terjangkau melalui mekanisme *offline* dan *online*, untuk memperluas mekanisme pengaduan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR, yang melalui media sms telah mencapai 1708) yang telah ada.
16. **Rencana Aksi Open Government 2016-2018** Indonesia mencakup kegiatan (i) Open Parlemen, (ii) Open Cities untuk pemerintah Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia, dan (iii) pencegahan konflik kepentingan di perusahaan swasta/BUMN, pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan.
17. Pemerintah melansir kebijakan dan memperluas cakupan kebijakan untuk **Pencegahan Konflik Kepentingan di 3 insitusi utama** masyarakat dalam upaya menegakkan integritas dan menurunkan korupsi: Perusahaan swasta dan BUMN, Pelayanan Kesehatan (RS dan Praktik dokter) dan Pelayanan pendidikan Perguruan tinggi negeri dan swasta)

INFID berdiri sejak tahun 1985. beranggotakan organisasi masyarakat sipil yang tersebar di seluruh Indonesia. INFID memiliki status lembaga nonprofit yang diakreditasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *UN Special Consultation Status with the Economic and Social Council* sejak 2004. INFID juga merupakan anggota IFP (*International Forum for National NGO Platform*) berbasis di Paris, Prancis. IFP adalah jaringan NGO global yang mewadahi forum-forum NGO nasional di seluruh dunia (<http://www.ong-ngo.org/en>) sejak 2009. INFID juga merupakan anggota *Executive Committee* dari Beyond 2015 (www.beyond2015.org), sebuah jaringan CSO mutinasional dari negara-negara Utara dan Selatan yang melakukan kampanye untuk Agenda Pembangunan Pasca-2015.

infid International
NGO Forum
on Indonesian
Development

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105
Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12540
Phone : 021 7819734, 7819735
Fax : 021 78844703
E-mail : infid@infid.org
Website : www.infid.org

6.2. Deklarasi Bojonegoro



Deklarasi Bojonegoro tentang Pelaksanaan Pancasila serta Perlindungan, Penghormatan, Pemajuan dan Pemenuhan HAM di Tingkat Lokal (Deklarasi Bojonegoro)

Kami, yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah, lembaga negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil berkumpul di Bojonegoro mulai tanggal 30 November sampai 2 Desember 2016 untuk menyelenggarakan Festival HAM 2016 yang berjudul “Merayakan Praktik Pancasila di Tingkat Lokal”.

Kami memandang bahwa di tengah dinamika kehidupan sosial politik nasional yang diwarnai konflik dan pertikaian elit, intoleransi serta ancaman kekerasan yang menggunakan sentimen SARA, penting rasanya mengidentifikasi, mengapresiasi dan merayakan praktik-praktik baik pelaksanaan Pancasila di tingkat daerah.

Kami memberi apresiasi yang sebesar-besarnya bahwa di beberapa daerah telah berlangsung praktik-praktik baik pelaksanaan Pancasila seperti di Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Batang, Kota Palu, Kabupaten Kulon Progo, Bitung dan lain-lain. Namun kami menyadari bahwa secara umum perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia masih menghadapi banyak tantangan.

Kami menyadari bahwa dalam konteks Indonesia, perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah bagian dari pengejawantahan Pancasila.

Kami menyadari bahwa perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah. Kami menyadari bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat mempengaruhi secara langsung kondisi hak asasi manusia.

Kami menyadari bahwa perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia memerlukan peran serta aktif masyarakat sipil dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya. Kami menyadari bahwa tingkat pemahaman hak asasi manusia di Indonesia masih belum merata baik di tingkat pemerintahan maupun di tingkat masyarakat sipil.

Kami menyadari bahwa pentingnya kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga yang memiliki visi yang sama (like minded group) di luar negeri, seperti Pemerintah Kota Metropolitan Gwangju di Korea Selatan untuk merealisasikan tujuan global di bidang HAM.



Oleh karena itu, berdasarkan kondisi-kondisi tersebut di atas, kami:

1. Berkomitmen untuk terus berusaha meningkatkan perlindungan, penghormatan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik;
2. Mendorong pemerintah daerah untuk mengambli inisiatif melaksanakan tanggung jawabnya di bidang hak asasi manusia;
3. Memastikan bahwa dalam menyelenggarakan agenda-agenda melaksanakan hak asasi manusia, perlu memerhatikan prinsip-prinsip HAM yang universal, non-diskriminatif, inklusif, partisipatoris, solidaritas, dan berkelanjutan;
4. Mendorong untuk dibuka seluas-luasnya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Meminta kepada semua pihak untuk berperan aktif dalam peningkatan kapasitas pengetahuan hak asasi manusia -- baik untuk aparat pemerintahan maupun masyarakat sipil serta pihak-pihak lainnya;
6. Mendorong kemitraan antara pemerintah daerah, warga, kelompok masyarakat sipil, akademisi dan sektor swasta untuk menyelenggarakan Kabupaten/Kota HAM; dan
7. Terlibat aktif dalam kerjasama global untuk mempromosikan human rights cities.

Bojonegoro, 1 Desember 2016

Suyoto, Bupati Bojonegoro (Wakil Pemerintah Daerah)

M Imdadun Rahmat, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Wakil Lembaga Negara)

Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID (Wakil Organisasi Masyarakat Sipil)

DEKLARASI

Dukungan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami perwakilan Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil, Kelompok Akar Rumput, Media dan Akademisi di Provinsi Jawa Tengah, menegaskan tekad kami untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), melalui kemitraan yang setara dan tanpa meninggalkan satu orangpun. Melalui tujuan pembangunan berkelanjutan, kami bertekad untuk:

1. Mengakhiri kemiskinan dan kelaparan;
2. Memerangi ketimpangan;
3. Membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif;
4. Melindungi HAM;
5. Mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
6. Memastikan perlindungan hakiki terhadap planet bumi dan sumber daya alamnya;
7. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam lingkup NKRI.

Semarang, 5 Desember 2016

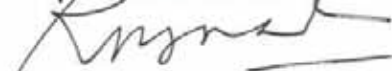
Gubernur

Provinsi Jawa Tengah



Ganjar Pranowo, SH. M.IP

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Indonesia
cq. Staff Ahli Menteri



(Ir. Rusnadi Padjung, M.Sc, PhD)

Direktur Pendidikan dan Agama
Bappenas



(Dr. Hadiat, MA)

Wakil Bupati Wonosobo



(Ir. Agus Subagyo, MS)

Senior Program Officer SDGs Infid



(Hamong Santono)

Rektor Unika Soegijapranata



(Prof. Dr. Y. Budi Widianarko, M.Sc)

disaksikan oleh semua elemen masyarakat.

No One Left Behind

Deklarasi Pangkep

MEWUJUDKAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

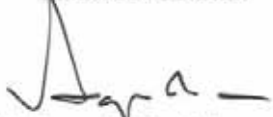
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami perwakilan Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil, Kelompok Akar Rumput, Media dan Akademisi meneguhkan tekad kami untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui kemitraan yang setara dan tanpa meninggalkan satu orangpun.

Melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, kami juga bertekad untuk :

1. Mengatasi persoalan yang masih dihadapi dalam mewujudkan keadilan sosial, kesetaraan gender, penghapusan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial.
2. Memperkuat dan mendayagunakan potensi yang dimiliki sebagai wilayah kepulauan untuk kesejahteraan, perdamaian dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
3. Membangun tata kelola pelaksanaan pembangunan yang memastikan keterlibatan masyarakat secara aktif dan menyeluruh.
4. Mewujudkan berbagai upaya untuk memberdayakan, melindungi dengan memberikan perlakuan khusus untuk memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat miskin, kelompok minoritas, perempuan dan kelompok-kelompok marginal lainnya.

Pangkep / Makassar. 01 Juni 2016

Wakil Gubernur
Sulawesi Selatan



H. Agus Arfin Nu'mang

Bupati Pangkep



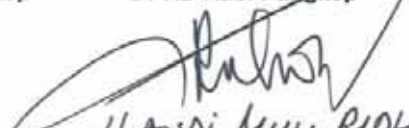
H. Syamsuddin Hamid

SKPD Kabupaten Pangkep



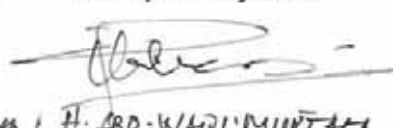
(H. Andi Muh. Ridwan)

DPRD Kab. Pangkep



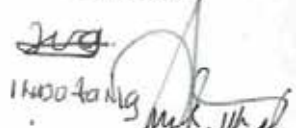
(H. Andi Muh. Ridwan)

Kelompok Masyarakat



(H. Abd. Wadi Murtaza)

Akademisi



(Misiyah)

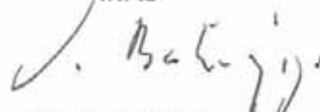
Disaksikan Oleh :

Tenaga Ahli Kedeputan IV
Kantor Staf Presiden R.I



Roysepda Abimanyu

Direktur Eksekutif
INFID



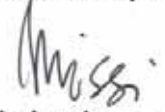
Sugeng Bahagijo

Direktur Pelaksana
YKPM



Mulyadi Prajitno

Ketua Pelaksana Harian
Institut KAPAL Perempuan



Misiyah

6.3 Kegiatan INFID

a. Program SDGs

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Peserta		Komposisi Peserta
				F	M	
1	10 Januari	Konferensi Pers Policy Wish List INFID	Kantor INFID			CSO
2	24 Februari	Peluncuran Duta Masyarakat Sipil SDGs	KOI Kemang			CSO, Artis, dan Pemerintah
3	11 Maret	Donor Meeting Update Pelaksanaan SDGs di Indonesia	Hotel Morrissey			
4	11 Maret	Audiensi dengan Menteri Bappenas bersama Duta SDGs	Kantor Bappenas			
5	22 Maret	Workshop Penulisan Panduan Implementasi SDGs	Kantor INFID	8	6	CSO, Akademisi
6	22 Maret	Launching SDGs Kabupaten Bojonegoro	Hotel Aston Kabupaten Bojonegoro			Pemkab Bojonegoro, CSO
7	7 April	Pertemuan Koordinasi Koalisi CSO untuk Agenda SDGS	Hotel 101 Bogor			CSO
8	14 April	Konferensi Pers INFID dan Sekretariat OGI: Bojonegoro Pelopor Open Government di Indonesia	Cafe Mahakam			Media, CSO, Bappenas, OGI
9	19 April	Diskusi Rencana Merancang Draft Perpres Open Government Versi CSO dan Membahas Masukan Akhir Draft Renaksi OGI 2016-2017 Pasca Pembahasan per Pokja 2 Minggu Terakhir	Kantor INFID	4	8	CSO
10	20-21 April	Seminar dan Lokakarya Mencari Gagasan Penerapan Sustainable Development Goals (bersama Koalisi NGO HAM Aceh)	Hotel Grand Naggroe, Aceh			CSO, Pemerintah, Duta SDGs
11	27 April	Rapat Koordinasi Pembahasan Kelompok Kerja Perpres SDGs	Kantor INFID			
12	April	Survei SDGs Indonesia – Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia https://www.surveymonkey.net/results/SM-JWSDSVPF/	Online			CSO
13	4 Mei	Pertemuan Koordinasi Kampanye SDGs dengan Jaringan Muda SDGs	Kantor INFID			CSO
14	13 Mei	FGD Position Paper / Koordinasi Tim Penyusun Draft Perpres	Griya Patia			CSO, KSP
15	17 Mei	Media Visit SDGs: Kunjungan ke Redaksi Media Massa Nasional bersama Duta SDGs	Kantor Redaksi Tempo, Jakarta Post, Kompas			Media, Duta SDGs, INFID, Oxfam
16	1-3 Juni	Workshop Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pangkep “Mewujudkan Kabupaten Pangkep sebagai Pelopor Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”	Hotel Swiss-Belinn Makassar			CSO, WRO, Pemda, Pemprov, KSP

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Peserta		Komposisi Peserta
				F	M	
17	16-18 Juni	Seminar dan Lokakarya “Diseminasi SDGs” (bersama Vivat dan UNIKA Widya Mandira	UNIKA Widya Mandira, Kupang			Akademisi, CSO, Pemerintah
18	28 Juni	Pertemuan Koordinasi Penyusunan Draft Perpres SGDGs	Kantor INFID			CSO
19		Revisi Buku Panduan SDGs untuk Pemerintah Daerah dan Stakeholder Daerah	Kantor INFID			
20	Juli	Finalisasi Draft Perpres oleh Tim	INFID			
21	11-20 Juli	High –Level Political Forum “Ensuring that No One is Left Behind”	UNHQ New York, US			INFID dan Duta SDGs
22	4 Agustus	Konferensi Pers “Menyikapi Kecenderungan Indonesia Melakukan Penghilangan Indikator Sunat Perempuan dalam Goal 5 SDGs”	Bakoel Koffie, Jakarta			CSO, Media
23	9 Agustus	Pertemuan Awal Penyusunan Rencana Aksi Nasional SDGs	Griya Patria, Jakarta			CSO, KSP
24	10-17 Agustus	Menghadiri Training GALAA-4			2	INFID, PEKKA
25	18-19 Agustus	FGD Penyusunan Buku Panduan Goal 16 SDGs	Bogor			CSO
26	19 Agustus	Rapat Tim Penulis Goal 5 SDGs	Griya Patria	6	2	CSO
27		Audiensi SDGs dengan Rektor UGM	UGM, Yogyakarta			
28		Audiensi SDGs dengan Rektor UNS	Jakarta			
29		Audiensi SDGs dengan Rektor UIN Sunan Kalijaga	UIN, Yogyakarta			
30		Audiensi SDGs dengan UNIKA Soegijapranata, Semarang	UNIKA Semarang			
31		Audiensi dengan UNHAS Makassar	Makassar			
32	3 Oktober 2016	Diskusi Peluncuran Panduan Pelaksanaan SDGs Khusus untuk Tujuan Penurunan Ketimpangan (Goal 10)	Hotel Grand Cemara	21	14	Jurnalis, CSO
33	4 Oktober	SDGs Expert Meeting “Peran Universitas dan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pencapaian SDGs di Indonesia”	Hotel JS Luwansa, Jakarta			CSO, Akademisi, Pemerintah, Pemda
34	6-9 September	Kampanye SDGs di Festival Filantropi Indonesia 2016	IPFEST2016, Jakarta			CSO, Umum, Media, Pemerintah
35	12 Oktober 2016	Diskusi Perkembangan Pelaksanaan SDGs dan Peranan Pergerakan Perempuan dalam pencapaian SDGs	Kantor INFID	12	4	CSO
36	16 Oktober 2016	Preparation Meeting: Penulisan Laporan SDGs Versi CSO	Kantor INFID	4	9	CSO

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Peserta		Komposisi Peserta
				F	M	
37	26 -27 Oktober	Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk SDGs "Memastikan Tidak Seorangpun dalam Perencanaan dan Pelaksanaan SDGs)	Hotel Aryaduta	29	27	Pemerintah, CSO
38	26 Oktober	SDGs Night	Hotel Aryaduta			Youth, CSO, Mahasiswa
39	15 November	Konferensi Pers "Penegakan Hukum dan Dinamika Demokrasi di Indonesia"	Resto Tjikinii 5, Jakarta			CSO
40	17 November	Diskusi Inisiasi SDGs di Propinsi Jawa Tengah	Wisma Perdamaian, Semarang			CSO, Pemprov, Akademisi
41	21 November	Dialog Publik Merawat Kebhinekaan	Resto Tjikinii 5, Jakarta			CSO, Tokoh Nasional
42	5 Desember	Seminar "Mendorong Inisiatif Pemerintah Daerah untuk Pencapaian Sustainable Development Goals di Propinsi Jawa Tengah" (bersama UNIKA Semarang)	UNIKA Semarang			
43	19 Desember	Lokakarya "Berbagi Pengetahuan Pengarusutamaan SDGs dalam Perencanaan Pembangunan Daerah" (INFID sebagai Co-Host bersama UNDP Indonesia)	Hotel Sari Pan Pacific			Pemda, UNDP, K/L Pemerintah, CSO

b. Program Penurunan Ketimpangan

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Peserta		Komposisi Peserta
				F	M	
1.	17-18 Februari 2016	Diskusi Terfokus Ketimpangan dan Peran Masyarakat Sipil	Grand Cemara Hotel	15	10	CSO, AKADEMISI, Media dan Parlemen
2.	02 Maret 2016	Rapat Evaluasi Diskusi Publik G20 dan Ketekuaan Republik Rakyat Tiongkok	Universitas Brawijaya Malang	54	39	CSO, Akademisi dan Media
3.	22 Maret 2016	Workshop Penulisan Panduan Implementasi SDGs	Kantor INFID	7	7	CSO dan AKADEMISI
4.	29 Maret 2016	FGD Revitalisasi Pelatihan Kerja	Hotel Aston. Jl Tb Simatupang Jakarta Selatan	5	22	CSO, dan Perusahaan
5.	06 April 2016	Konferensi Pers INFID "Usulan Kebijakan Penurunan Ketimpangan Pasar Kerja: Perluas Kesempatan Kerja untuk Semua"	Kantor INFID	4	4	CSO dan Media Massa
6.	1 – 6 Mei 2016	Menghadiri ADB Annual Meeting	Frankfurt, Jerman	1		CSO
7.	21 – 22 Juni 2016	Menghadiri CSO C20 Consultation Meeting	Cape Town, Afrika Selatan	3		CSO

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Peserta		Komposisi Peserta
				F	M	
8.	28-29 Juli 2016	Menghadiri BRICS National Consultation	New Delhi, India	1		CSO
9.	16 Agustus 2016	Workshp desain penelitian pendanaan untuk masyarakat sipil bersama dengan Konsil LSM	Griya Patriya	7	8	CSO
10.	18 Agustus 2016	Workshop Konsorsium Masyarakat Sipil untuk Pelatihan Kerja	Griya Patriya	1	6	CSO
11.	23 September 2016	Peer review kajian pendanaan untuk masyarakat sipil bekerja sama dengan Konsil LSM	Kantor INFID	2	3	CSO
12.	21 November 2016	Konfrensi Pers : Dialog Publik bertemakan "Merawat Kebhinekaan dan Demokrasi di Indonesia"	Restoran Tjikinii Lima , Jl. Cikini 1 no. 5, Jakarta Pusat			CSO dan Media Massa
13.	23 November 2016	Workshop desain ASEAN Mapping	Kantor INFID	4	1	CSO
14.	8 Desember 2016	Rapat Koordinasi Persiapan untuk RTD Kerangka Upah Minimum di ASEAN	Kantor INFID	9	3	CSO
15.	14 Desember 2016	Focus Group Discussion on ASEAN Framework for Lifting Minimum Wage to Living Wage	Hotel Aryaduta	7	15	CSO, Akademisi, Perusahaan
16.	16 Desember 2016	Koordinasi Persiapan Seminar Satu Hari "Peran BPJS dalam Menurunkan Ketimpangan dan Memperkuat Kohesi Sosial di Indonesia"	Kantor INFID	8	6	CSO
17.	21 Desember 2016	Seminar Satu Hari "Peran BPJS dalam Menurunkan Ketimpangan dan Memperkuat Kohesi Sosial di Indonesia"	JS Luansa Hotel, Rasuna Said, Jakarta Selatan			CSO, AKADEMISI, Perusahaan, Serikat Pekerja, Pemerintah

c. Program HAM dan Demokrasi

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Peserta		Komposisi Peserta
				F	M	
1.	11 Februari 2016	Penyusunan Indeks Kota Ramah HAM	Kantor INFID	2	7	CSO
2.	1-3 Maret 2016	Pelatihan Kabupaten Kota Ramah HAM	Batu - Malang	20	30	Pemerintah dan CSO
3.	14 Maret 2016	Rapat Evaluasi dan Pembahasan RTL Training Kab/Kota Ramah HAM	Kantor INFID	3	5	CSO
4.	24 Maret 2016	Rapat Persiapan Penyusunan HRC Index	Kantor INFID	6	8	CSO
5.	7 Juni 2016	Finalisasi Buku Panduan Human Rights City INFID	Jakarta			CSO
6.	14 Juni 2016	Peer Review Buku Panduan HRC	Hotel A One. Jl Wahid Hasyim No. 80 Jakarta Pusat	6	10	CSO

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Peserta		Komposisi Peserta
				F	M	
7.	20 Juni 2016	Preparation Meeting on Program Walking the Talk : Promoting Accountable Business through Advancement of UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) Implementation in Indonesia	A One Hotel – Jakarta Pusat			
8.	29 Juni 2016	Preparation Meeting on Program Walking the Talk : Promoting Accountable Business through Advancement of UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) Implementation in Indonesia	Hotel Santika - Medan	8	11	
9.	14 Juli 2016	Preparation Meeting on Program Walking the Talk : Promoting Accountable Business through Advancement of UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) Implementation in Indonesia	Hotel Santika - Pontianak	5	16	
10.	20 – 24 Juli 2016	World Human Rights City Forum	Gwangju – Korea Selatan			
11.	22 – 23 Juli 2016	Global Platform for the Right to the City Regional Meeting II	Surabaya			
12.	26 Juli 2016	Side Event di PrepCom3 UN Habitat “Human Rights and the Right to the City: Towards Inclusive and Equitable Cities”	Surabaya			
13.	16 Agustus 2016	Rapat Persiapan Festival HAM 2016	Griya Patriya	7	5	CSO
14.	16 – 17 Agustus 2016	Civil Society Inovation Initiative East Asia Consultation	Bangkok			
15.	20 – 22 Agustus 2016	Menghadiri Konsultasi Demokrasi Asia oleh ADN	Bali			
16.	20 September 2016	Side Event di Sidang Dewan HAM PBB ke 33 “The Roles of Local Government in the Implementation of Human Rights; Learning from Human Rights Cities”	Genewa	10	16	
17.		Penyusunan modul pelatihan untuk pengenalan Panduan Prinsip PBB untuk Bisnis dan HAM				
18.		Pembuatan video dan materi kampanye Bisnis dan HAM				
19.	25 Oktober 2016	Menghadiri FGD Penyusunan Raperda HAM Kabupaten Lampung Timur	Lampung Timur			
20.	28 Oktober 2016	Peer Review Modul Pelatihan	ORIA Hotel - Jakarta			
21.	16 – 18 November 2016	Pelatihan Panduan Prinsip PBB untuk Bisnis dan HAM untuk Jurnalis, dalam rangkaian Festival Media AJI Indonesia (BHR)	Hotel Alpha - Pekanbaru	14	32	CSO dan Jurnalis

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Peserta		Komposisi Peserta
				F	M	
22.	10 November 2016	Kuliah Umum menuju Festival HAM 2016	Universitas Indonesia - Depok	20	33	CSO, AKADEMISI dan Media Massa
23.	16 November 2016	Kuliah Umum menuju Festival HAM 2016	Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta	53	81	CSO, AKADEMISI dan Media Massa
24.	21 November 2016	Kuliah Umum menuju Festival HAM 2016	Universitas Islam Indonesia - Makassar	98	76	CSO, AKADEMISI dan Media Massa
25.	30 Nov - 2 Des 2016	"Festival HAM 2016", 30 November - 2 Desember 2016 "Merayakan Praktik Pancasila di Tingkat Lokal".	Bojonegoro - Jawa Timur.			
26.	8 - 10 Desember 2016	Menghadiri Bali Democracy Forum	Bali			

d. Program Pencegahan Intoleransi dan Radikalisme

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Peserta		Komposisi Peserta
				F	M	
1.	28-29 Juli 2016	Workshop Persiapan Program	Hotel Oria, Jakarta		3	Partner Program, CSO, KSP, UK Embassy
2.	Agustus - Oktober 2016	Baseline Survey "Persepsi dan Sikap Generasi Muda terhadap Radikalisme dan Ekstremisme Kekerasan"	Bandung, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Pontianak		602	Generasi muda usia 15-30 tahun
3.	Agustus - Oktober 2016	Internet and Social Media Mapping	Jakarta - Yogyakarta		2	Jaringan Gusdurian
4.	1 September 2016	Rapat Koordinasi Internet and Social Media Mapping	Wahid Institute, Jakarta		4	INFID, Konsultan Media Sosial, Partner Program
5.	27 September 2016	Konferensi Pers "Kompetisi Essay dan Multimedia Islam Damai oleh NU Online dan INFID"	Gedung PBNU, Jakarta			Media, NU, INFID
6.	Oktober 2016 - Juni 2017	Penerjemahan Buku	Yogyakarta			
7.	4 November 2016	FGD Evaluasi Baseline Survey	INFID, Jakarta			INFID, Peneliti, Jaringan Gusdurian

No	Tanggal	Kegiatan	Tempat	Peserta		Komposisi Peserta
				F	M	
8.	15-16 November 2016	Workshop Materi Kampanye Kontra Radikalisme dan Ekstrimisme di Indonesia	Hotel Oria, Jakarta			INFID, KSP, UK Embassy, Mitra Program, Stakeholders
9.	1 Desember 2016	National Workshop "Menangani Ekstrimisme dan Merawat Toleransi di Indonesia"	Bojonegoro			Pemerintah lokal, Akademisi, Masyarakat Sipil, Organisasi Masyarakat Sipil, Mahasiswa, Kepala daerah
10.	14 Desember 2016	Diskusi Publik Hasil Survey Persepsi Anak Muda terhadap Radikalisme dan Pemetaan Internet dan Media Sosial	UGM, Yogyakarta			Pemerintah lokal, Akademisi, Santri, Masyarakat Sipil, Organisasi Masyarakat Sipil, Mahasiswa
11.	15 Desember 2016	Diskusi Publik Hasil Survey Persepsi Anak Muda terhadap Radikalisme dan Pemetaan Internet dan Media Sosial	Hotel Sultan, Solo			Pemerintah lokal, Akademisi, Santri, Masyarakat Sipil, Organisasi Masyarakat Sipil, Mahasiswa
12.	15 Desember - 15 Januari 2016	Penerbitan artikel online di Islami.co	Jakarta			

6.4. Siaran Pers INFID

No	Tanggal	Judul Release	Lembaga
1	20 Januari 2016	Catatan Awal Tahun INFID: Harapan Perubahan dan Perbaikan Kebijakan Tahun 2016	INFID
2	24 Februari 2016	Tokoh Masyarakat Ajak Publik Kenali Tujuan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	INFID
3	22 Maret 2016	Bupati Bojonegoro Resmikan Peluncuran SDGs	INFID
4	6 April 2016	Indonesia Darurat Mafia Perpajakan: Pemerintah Harus Bergas Membasmi!	FORUM PAJAK BERKEADILAN
5	6 April 2016	LPDP Plus: Kesempatan Kerja untuk Semua	INFID
6	14 April 2016	Bojonegoro Terpilih sebagai Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka Open Government Partnership	INFID DAN SEKRETARIAT OPEN GOVERNMENT INDONESIA
7	18 April 2016	Lawatan Ke Eropa, Presiden Jokowi Harus Bahas Tata Kelola Pajak yang Adil dan Transparan	INFID bersama Forum Pajak Berkeadilan
8	4 Agustus 2016	Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Sipil Untuk SDGs Pentingnya Indikator Sunat Perempuan dalam Goal 5 SDGs bagi Indonesia	INFID-Koalisi Masyarakat Sipil
9	5 September 2016	Siaran Pers Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kebijakan Luar Negeri Merespond Pertemuan G20	INFID dan Forum Pajak Berkeadilan
10	27 September 2016	Kompetisi Esai dan Video untuk Penyebaran Konten Islam Damai	INFID - NU Online
11	4 Oktober 2016	Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan	INFID-Koalisi Masyarakat Sipil
12	30 November 2016	Festival HAM 2016, Dari Bojonegoro untuk Indonesia dan Dunia.	INFID
13	1 Desember 2016	Gerakan Kota/Kabupaten Ramah HAM Indonesia Sebagai Jawaban Permasalahan Global.	INFID
14	1 Desember 2016	Pancasila sebagai pedoman kota/kabupaten ramah HAM yang bersifat Inklusif.	INFID
15	1 Desember 2016	Deklarasi Bojonegoro tentang Pelaksanaan Pancasila serta Perlindungan, Penghormatan, Pemajuan dan Pemenuhan HAM di Tingkat Lokal	INFID
16		Bisnis dan HAM pada Festival HAM 2016	Oxfam di Indonesia, INFID, dan Indonesia Global Compact Network (IGCN)
17	9 Desember 2016	Catatan Akhir Tahun Forum Pajak Berkeadilan "Kinerja Perpajakan dan Korupsi Sektor Swasta"	Forum Pajak Berkeadilan
18	14 Desember 2016	Rilis Bersam Mayoritas Anak Muda Tidak Menyetujui Tindakan Radikal Berbasis Agama Karena Agama Tidak Mengajarkan Kekerasan	INFID - Jaringan Gusdurian Indonesia
19	21 Desember 2016	Seminar Satu Hari "Peran BPJS Ketenagakerjaan Dalam Menurunkan Ketimpangan dan Memperkuat Kohesi Sosial di Indonesia"	INFID

6.5. Daftar Publikasi INFID

No	Tanggal	Judul Publikasi	Program
1	Januari 2016	Policy Wish Lish 2016 "Harapan Perubahan dan Perbaikan Kebijakan INFID 2016"	Semua Program
2	Januari 2016	(Panduan) Kabupaten dan Kota Ramah Hak Asasi Manusia	HAM dan Demokrasi
3	Januari 2016	(Dokumen) Hasil Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	SDGs
6	Juni 2016	(Buku Panduan SDGs) Sustainable Development Goals-SDGs, Panduan untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah	SDGs
7	Juni 2016	(Buku Laporan Riset) Studi Tentang Toleransi dan Radikalisme di Indonesia	HAM dan Demokrasi
8	Juli 2016	(Buku Panduan SDGs) Penurunan Ketimpangan, Panduan Teknis Goal 10 SDGs untuk Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Daerah	SDGs dan Ketimpangan
10	Agustus 2016	Buku Panduan Human Rights Cities (HRC)	HAM dan Demokrasi
11	September 2016	Infografik Human Rights Cities (HRC)	HAM dan Demokrasi
15	November 2016	(Temuan Survey 6 Kota) Persepsi dan Sikap Generasi Muda Terhadap Radikalisasi dan Ekstrimisme Kekerasan	CVE
16	November 2016	(Buku Panduan) Pelatihan Bisnis dan HAM	HAM dan Demokrasi
19	Desember 2016	(Rekomendasi INFID) Usulan Kebijakan Penurunan Ketimpangan Pasar Kerja	Ketimpangan

6.6. INFID memberi Input Subtansi

NO	Tanggal	Kegiatan	Tempat
1	13 Februari 2016	Memberikan paparan tentang SDGs dan kerangka pembangunan yang inklusif untuk KONAS Difabel dan YAKKUM	Yogyakarta
2	26 Februari	Narasumber dalam pelatihan SDGs untuk jurnalis yang diselenggarakan AJI dan Save The Children	Bandung
3	2 Maret 2016	Memberi masukan tentang partisipasi warga dan kelompok warga dalam pelaksanaan dan pencapaian SDG untuk forum Vivat Internasional	Pacet Jawa, Timur
4	8 Maret 2016	FGD Penyusunan Indikator Kabupaten/Kota Kreatif – <i>Creative Cities</i> , oleh Menko Kemaritiman	Jakarta
5	10 Maret 2016	Memberikan paparan tentang implementasi SDGs dan strategi nasional untuk meningkatkan peran CSO dan Pemda untuk UCLG	Jakarta
6	10 April 2016	Paparan mengenai pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi penghindaran pajak merujuk pada laporan Panama Papers bersama dengan Forum Pajak Berkeadilan	Jakarta
7	13 April 2016	Memberikan masukan tentang SDGs dan Tantangannya untuk persiapan International Civil Society Weeks 2016	Jakarta
8	23 April 2016	Pemaparan mengenai Ketimpangan dan kerjasama perpajakan internasional	Gedung DPR RI, Jakarta
9	3 Mei 2016	Presentasi mengenai Infrastruktur di Indonesia di Workshop Towards a New Business Model for Public Development Bank? Challenge and Perspective	Frankfurt, Jerman
10	19 Mei 2016	Pemaparan tentang SDGs untuk forum Kompas-UNDP	Jakarta
11	24 Mei 2016	Presentasi mengenai Perempuan dan SDGs di Pelatihan Fasilitator Lapangan PEKKA	Jakarta
12	3 Juni 2016	Memberikan pemaparan tentang SDGs kepada Pemkot Makassar	Makassar
13	21 Juni 2016	35th Talking ASEAN on "ASEAN Civil Society Conference/ ASEAN People's Forum (ACSC/APF) 2016 in Timor-Leste: Potentials and Constraints for the Future of CSOs' Engagement, The Habibie Center	Jakarta
14	Juli 2016	Menulis artikel untuk Jurnal MAARIF, Edisi Juli 2016 (telah terbit dan diluncurkan pada 31 Oktober 2016 di Gedung PP Muhammadiyah)	Jakarta
15	21 Juni 2016	Presentasi mengenai G20 dan SDGs di CSO C20 Preparatory Meeting yang diselenggarakan oleh Economic Justice Network	Cape Town, Afrika Selatan
16	20-24 Juli 2016	Berpartisipasi aktif dalam Experts Meeting tentang Pemerintah daerah dan HAM dalam World Human Rights Cities Forum (WHRCF)	Gwangju, Korea Selatan
17	28 Juli 2016 di	Memberi paparan dan masukan tentang Perjalanan dan Capaian Open Government Partnership (OGP) untuk forum "Membumikan Open Government"	Jakarta

NO	Tanggal	Kegiatan	Tempat
18	28-29 Juli 2016	Presentasi mengenai SDGs dan Ketimpangan di BRICS National Consultation yang diselenggarakan oleh OXFAM India	New Delhi, India
19	5 Agustus 2016	Memberi materi soal Hak-Hak Ekosob di Indonesia kepada peserta pelatihan SEHAM, KontraS	Jakarta
20	23 Agustus 2016	Memberi masukan dalam Simposium Agenda 2030 tentang Peran CSO dalam Pencapaian SDG untuk forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI	Hotel Aryaduta, Jakarta
21	20 September 2016	Side-Event "Local Government and Human Rights", Dewan HAM PBB	Geneva, Swiss
22	19 Oktober 2016	Presentasi mengenai Agenda Ketimpangan di G20 di Workshop Peran Strategi G20 bagi Pembangunan Nasional dan Global yang diselenggarakan oleh Bappenas	Jakarta
23	15 November	Memberikan paparan tentang Memastikan Kelompok Difabel Terlibat dalam SDGs yang diselenggarakan oleh OHANA	Yogyakarta
24	21 November 2016	"Sharing Inisiatif dan Inovasi Kota Sebagai Instrumen Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia"	Jakarta
25	22 November 2016	Pemaparan mengenai Peran Jaringan dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia di acara Open SDGs Club	Berlin
26	5 Desember 2016	Pemaparan mengenai ekonomi politik Internasional paska terpilihnya Donal Trump di Regional Meeting "Peoples Forum against FTA"	Jakarta
27	7-9 Desember 2016	Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF) ke 9	Denpasar
28	9 Desember 2016	Pemaparan mengenai Kerjasama Perpajakan Internasional di Catatan Akhir Tahun Forum Pajak Berkeadilan	Jakarta
29	15 Desember 2016	Memberi input tentang Peran Korporasi dalam Mencapai SDG pada forum Danone	Yogyakarta
30	19 Desember 2016	Memberi paparan dan input tentang SDGs pada forum UNDP	Jakarta
31		Pelanggaran HAM Masa Lalu bersama dengan KKPK	Jakarta
32	Sepanjang 2016	Pertemuan mengenai Kota Ramah HAM Pemerintah Daerah (Bojonegoro, Lampung Timur, Wonosobo)	Bojonegoro, Wonosobo, Lampung Timur



**NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of
the United Nations, Ref. No : D1035**

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12540

Phone : 021 7819734, 7819735

Email : info@infid.org

Website: www.infid.org